

BAB III

PEMBAHASAN

Hal yang di bahas dalam bab ini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan operasional yang telah ditentukan sebelumnya sebagai acuan dalam penelitian. Operasional yang dimaksud adalah teori dari Ramlan Surbakti mengenai identitas bersama yang juga menjadi faktor berpengaruh dalam perilaku politik seseorang termasuk seorang kiai. Faktor-faktor itu adalah primordial, sakral, personal, sejarah, Bhinneka Tunggal Ika, Ekonomi dan Kelembagaan.

Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yakni untuk mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik kiai Pondok Pesantren Al-Munawwir dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bantul tahun 2015. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pesantren Al-Munawwir merupakan salah satu Pesantren yang berpengaruh di Kabupaten Bantul, dengan memiliki basis massa yang cukup banyak serta tidak menutup diri dari aktivitas politik. Hal ini yang menurut penulis yakin bahwa Pesantren Al-Munawwir representatif untuk dijadikan lokasi penelitian.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2015 yang lalu diikuti oleh dua pasangan calon yaitu pasangan Suharsono – Abdul Halim Muslih yang bersaing dengan pasangan Sri Surya Widati – Misbakhul Munir sebagai petahana. Sesuai dengan hasil perhitungan suara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bantul, maka pasangan calon Suharsono – Abdul Halim Muslih ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara sebesar 260.834

suara (52,80%) sedangkan pasangan Sri Surya Widati – Misbakhul Munir mendapatkan suara sebesar 233.196 suara (47,20%). Total suara sah adalah 493.239 suara, dengan demikian Suharsono – Halim unggul dengan 27.638 suara lebih banyak.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menggali informasi tentang perilaku politik kiai Pondok Pesantren Al-Munawwir dalam menyikapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015. Secara spesifik penulis berusaha untuk menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik kiai di Al-Munawwir sehingga menjadi salah satu bagian atau unsur dalam dinamika pemilihan kepala daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 yang lalu.

Identitas bersama sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap atau perilaku politik seseorang atau dalam hal ini seorang kiai sebagai tokoh agama mayoritas. Pondok Pesantren Al-Munawwir adalah salah satu pesantren tertua di Kabupaten Bantul. Kiai di Al-Munawwir sudah barang tentu memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Bantul yang kurang lebih 95 % adalah penganut agama Islam. Tempat yang dimaksud lebih khususnya bagi seorang muslim yang ikut tergabung dalam ikatan Nahdlatul Ulama (NU) yang secara tradisi selalu menghormati kiai atau sesepuhnya.

Pesantren Al-Munawwir banyak melahirkan kader-kader pemimpin bangsa yang tetap merasa bangga dan gembira atas identitasnya sebagai kaum santri, sebut saja nama-nama seperti KH. Abdurrahman Wahid, KH. Mustofa Bisri, KH.

Said Aqil Siradj dan lain-lain. Kiai di pesantren Al-Munawwir tidak sedikit juga yang ikut terjun langsung ke dunia politik, sebagai contoh adalah KH. Ahmad Warson Munawwir yang merupakan putra dari KH. Muhammad Munawwir (pendiri Pesantren Al-Munawwir). KH. Warson pernah menjabat sebagai anggota legislatif di DPRD DIY melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP), selain itu juga beliau memprakarsai berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa di Yogyakarta.

Selain ikut terjun langsung ke panggung politik, kiai di pesantren Al-Munawwir juga berafiliasi dengan partai politik tertentu atau mempunyai kedekatan dengan berbagai tokoh politik. Pesantren ini memang menjadi lembaga yang cukup “laris” didatangi oleh para aktor politik baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 menjadi kegiatan politik teranyar yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Bantul termasuk Pesantren Al-Munawwir yang terletak di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Berikut ini akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik kiai Pondok Pesantren Al-Munawwir dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

A. Faktor Primordial dalam Perilaku Politik Kiai Pondok Pesantren Al-Munawwir

Kesamaan identitas antara kandidat yang bersaing dalam pilkada dengan masyarakat sebagai pemegang hak pilih memang sedikit banyak mempengaruhi atas berjalannya proses demokrasi lokal tersebut, terutama dalam hal menentukan pilihan politik dari pemilih. Ikatan primordialisme

antara kandidat dengan pemilih menjadi satu nilai kelebihan tersendiri bagi setiap kandidat yang bersaing. Primordialisme itu sendiri merupakan keterkaitan seseorang dalam kelompok atas dasar ikatan kekerabatan, suku bangsa, kebahasaan dan adat istiadat sehingga melahirkan pola perilaku serta cita-cita yang sama. Ikatan primordial antara kandidat politik dengan kiai menjadi suatu pembeda dan secara teoritis akan mempengaruhi perilaku politiknya. Dalam Pilkada Bantul tahun 2015 yang lalu meski tidak secara primordial, namun terdapat hubungan patron-klien di kalangan pesantren yang menimbulkan sebuah ikatan persahabatan instrumental.

Berdasarkan wawancara bersama KH. Muhtarom Ahmad selaku Pengasuh Komplek S Al-Munawwir sekaligus Ketua Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir (IKAPPAM) beliau menjelaskan bahwa:

“Secara politis dalam pilkada yang lalu saya hanya sebagai penggembira saja, sebatas menyalurkan hak pilih dan kebetulan saya kenal dengan Pak Halim (Wakil Bupati terpilih), kami sering bertemu dan mengobrol karena beliau sebagai santri juga sering datang ke sini. Sebenarnya dengan Bu Idham juga saya kenal karena saya pernah membimbing keluarga Pak Idham Samawi ketika beribadah haji”. (Wawancara KH. Muhtarom 26 Februari 2017)

Secara khusus beliau menyebutkan mengenal dua pasangan calon yaitu Sri Surya Widati - Misbakhul Munir dan Suharsono - Abdul Halim Muslih serta memiliki hubungan yang baik terlebih dengan Abdul Halim Muslih sebagai wakil bupati terpilih. KH. Muhtarom Ahmad dengan senang hati mengabarkan bahwa beliau memilih pasangan nomor urut satu yaitu Suharsono – Halim, beliau menjelaskan bahwa Abdul Halim sering berkunjung dan mengikuti serangkaian kajian dan kegiatan yang diadakan di Pesantren Al-Munawwir.

Kesamaan identitas yang timbul adalah berdasarkan latar belakang kesantrian antara Abdul Halim sebagai calon wakil bupati pada saat itu dengan kiai-kiai di Al-Munawwir sebagai pemegang hak pilih. Ikatan primordial yang terjalin adalah hubungan kiai dan santri yang sakral dan secara tradisi di pesantren hubungan itu tidak akan terputus. Meski mengenal kedua pasang calon, KH Muhtarom lebih mendukung Abdul Halim untuk memimpin Kabupaten Bantul karena beliau memiliki latar belakang sebagai seorang santri dan dianggap dapat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat terutama dunia pesantren.

Hubungan yang terjalin dalam dunia politik adalah salah satu modal yang dapat memuluskan jalan untuk meraih suatu kekuasaan. Hubungan itu menurut KH. Muhtarom menciptakan suatu ikatan emosional sehingga seorang kandidat akan dengan lebih mudah mengambil hati pemegang hak pilih. Dalam rangka menjalin hubungan itu, Abdul Halim Muslih berkenan untuk berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Munawwir meski tidak terlalu sering. Namun hal itu melebarkan jaringan sehingga dengan senang hati kiai yang dikunjunginya akan mempunyai simpati terhadapnya. Abdul Halim beberapa kali turut ikut serta dalam kajian Hadis, kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi, Shalawatan hingga Haul (peringatan hari kematian) sesepuh-sesepuh Pesantren Al-Munawwir.

Faktor primordial lain yang menjadi bahan pertimbangan adalah kebahasaan, namun hal ini bukanlah untuk kepentingan pesantren, namun untuk kepentingan warga Bantul secara umum. Bahasa adalah alat komunikasi

antara seorang individu dengan individu lainnya termasuk antara seorang pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya. Bahasa bisa mendekatkan dan bisa juga menjauhkan. Bahasa yang baik akan menghasilkan output yang baik pula dan begitu pula dengan sebaliknya. Oleh karena itu faktor kebahasaan sebagai salah satu pembentuk identitas bersama menjadi bahan pertimbangan bagi kiai di Al-Munawwir. KH. Hafidz misalnya berpendapat:

“bupati itu kan pemimpin masyarakat, seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi, ngobrol, dan memberi instruksi kepada masyarakat. Bahasa tentu penting, kalau pemimpin tidak bisa berbahasa dengan baik, bagaimana mau memahami permasalahan di masyarakat? Pemimpin itu harus bisa bicara dengan baik, komunikasinya bagus, sopan, tidak asal bicara, paham tata krama orang Jawa. Ya minimal harus bisa berbahasa Jawa dengan baik, karena di kampung-kampung masih banyak orang yang tidak bisa komunikasi selain dengan bahasa Jawa.” (Wawancara KH. Hafidz 5 Maret 2016).

Pesantren Al-Munawwir memelihara erat budaya berbahasa Jawa. Bahasa Jawa yang baik, tidak kasar dan sesuai dengan peruntukannya. Sebagai bentuk kecintaannya, Bahasa Jawa dijadikan sebagai bahasa pengajaran sehari-hari. Pengajian-pengajian kitab kuning (klasik) selalu menggunakan bahasa Jawa untuk menterjemahkan bahasa yang dikaji, begitu juga ketika kiai menjelaskan maksud dari kajiannya kepada para santri. Selain itu tujuan lain dari penggunaan bahasa Jawa adalah untuk memudahkan santri dalam memahami apa yang dijelaskan oleh kiai. Meski demikian bahasa Indonesia juga disisipkan untuk memberikan pemahaman kepada santri yang belum bisa berbahasa Jawa namun dengan catatan santri tetap harus belajar berbahasa Jawa. Di Komplek S Al-Munawwir misalnya, KH Muhtarom dalam pengajian

rutin KH Muhtarom menterjemahkan dan menjelaskan kitab hadis *Riyadussalihin* dan *Durratunnasih* dengan bahasa Jawa.

Dalam pemilihan kepala daerah Bantul tahun 2015 yang lalu, KH. Muhtarom Ahmad menyebutkan bahwa beliau sering berkomunikasi dengan Abdul Halim Muslih dengan bahasa Jawa dan sesekali berbahasa Indonesia. Bahasa Jawa dirasa lebih dapat mencairkan suasana dan meningkatkan keakraban kedua belah pihak komunikator. Namun faktor jenis bahasa bukanlah yang utama, hal yang terpenting adalah seorang pemimpin wajib berbahasa dengan baik dan santun. Tidak mengeluarkan kata-kata keji yang nantinya akan ditiru oleh masyarakat umum karena bagaimanapun juga seorang pemimpin adalah panutan bagi orang-orang yang dipimpinnya.

Identitas bahasa memang bagi sebagian lainnya sangatlah penting, karena masih banyak diantara masyarakat Bantul yang buta aksara. Biasanya masyarakat buta aksara seringkali tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik sehingga menggunakan bahasa ibu (bahasa daerah) untuk berkomunikasi sehari-hari. Pendapat KH Hafidz sebelumnya bisa dijelaskan dengan data sensus penduduk Badan Pusat Statistik Tahun 2010 menjelaskan bahwa masih banyak penduduk Kabupaten Bantul yang masih buta aksara. Dari 5 Kabupaten Kota yang ada di DIY, Kabupaten Bantul berada di posisi kedua dalam persentase penduduk buta aksara dengan usia di atas 15 tahun.

Tabel 3.1
Data Buta Aksara Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
Usia di Atas 15 Tahun

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin (orang)		Jumlah (orang)	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	Gunungkidul	33.729	74.984	108.713	38.00
2.	Bantul	21.257	51.688	72.945	25.75
3.	Sleman	16.382	43.958	63.340	22.00
4.	Kulon Progo	9.243	23.965	33.208	11.70
5.	Yogyakarta	1.693	6.711	8.404	2.96
Jumlah		82.304	201.306	283.610	

Sumber: Website Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY

Tabel di atas menyimpulkan bahwa dari total 283.610 penduduk DIY yang buta aksara, 25.75% dari jumlah itu adalah warga Kabupaten Bantul. Kesimpulan lainnya adalah terdapat 72.945 orang warga Kabupaten Bantul yang tidak bisa baca tulis sehingga akan mengalami kesulitan dalam berbahasa. Identitas kebahasaan akan sangat berpengaruh bagi angka di atas, dan menjadi tugas bersama agar kesenjangan di atas bisa diatasi. Data di atas menjadi alasan bagi KH. Hafidz mengenai pentingnya pemimpin daerah di Kabupaten Bantul untuk menguasai Bahasa Jawa yang baik dengan tujuan sebagai alat komunikasi kepada lapisan masyarakat tertentu. Selain itu dibutuhkan juga komitmen untuk menyelesaikan permasalahan kebahasaan yang terjadi. Kiai di pesantren Al-Munawwir dalam hal ini bertugas melalui jalur keagamaan dengan mengajarkan tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar agar sejalan dengan tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemberantasan buta aksara.

Selain faktor kebahasaan, faktor lain yang secara tersirat menjadi bahan pertimbangan kiai di Al-Munawwir adalah kedaerahan. Lebih lanjut KH. Muhtarom Ahmad berpendapat:

“Idealnya kan seorang kepala daerah harus menguasai tentang hal-hal yang terkait dengan daerah yang akan dikelolanya. Idealnya memang adalah putra asli daerah Bantul itu sendiri, tapi nyatanya itu tidak dipermasalahkan di Bantul. Buktinya Pak Halim bukanlah orang asli Bantul, beliau adalah orang kelahiran Rembang, tapi karena memenuhi syarat dan sudah lama di Bantul sehingga menguasai masalah-masalah yang ada di Bantul”. (Wawancara KH. Muhtarom 26 Februari 2017)

Dari argumen beliau, arti pentingnya kedaerahan adalah sebagai tolak ukur untuk memahami masalah-masalah yang ada di daerah. Sederhananya, seorang putera asli daerah akan lebih mengetahui urgensi masalah yang ada di daerah dan tahu mana yang harus diprioritaskan. Namun disadari betul oleh beliau bahwa tidak ada konstitusi yang mengatur seorang bupati dan wakil bupati Bantul harus orang asli Bantul. Selain itu, tidak berarti juga bahwa orang yang bukan asli putera daerah tidak mengerti permasalahan yang muncul dan belum terselesaikan, artinya siapaun itu, selama dia sanggup maka akan didukung.

Konsep itu juga berlaku di internal Pesantren Al-Munawwir itu sendiri, saat ini keluarga penerus Pondok Pesantren Al-Munawwir tidak semua merupakan putera daerah asli Kabupaten Bantul dan keturunan dari Bani (keluarga) KH. Munawwir. KH Muhtarom Ahmad misalnya, ia berasal dari Indramayu yang setelah menjadi satri lalu kemudian menetap di Bantul. Bahkan KH. Ali Maksum sebagai tokoh perjuangan di Al-Munawwir berasal

dari Rembang dan di masa kepemimpinan beliau lah Pesantren Al-Munawwir mengalami kemajuan.

Selain itu kesamaan identitas lain yang membentuk ikatan primordial antara Abdul Halim dengan Pesantren Al-Munawwir adalah adat istiadat terutama yang berkaitan dengan adat istiadat keagamaan. Al-Munawwir merupakan Pondok Pesantren yang memegang erat aqidah *ahlu sunnah wa al-jamaah* dan menjadi salah satu rumah besar bagi para *nahdliyin* (seseorang yang berafiliasi atau sebagai anggota ormas Nahdlatul Ulama). Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki adat istiadat tersendiri dalam kegiatan ibadah dan keagamaan dengan didasarkan aqidah *ahlu sunnah wa al-jamaah*. Budaya keagamaan yang menjadi adat istiadat NU diantaranya adalah Tahlilan, Maulidan, Muharraman, peringatan Isra Mi'raj dan lain-lain. KH. Muhtarom Ahmad menjelaskan bahwa;

“tidak ada adat istiadat kedaerahan yang mendasari pilihan politik saya, tapi ikatan emosional itu munculnya dari adat istiadat keagamaan. Pak Halim dengan saya sebagai sesama santri dan nahdliyin. Beliau kalau ada shalawat, maulidan, haul biasanya ikut kesini. Dan ini tidak jadi soal, memilih karena kesamaan identitas itu memang boleh dan lumrah saja, serta kesamaan identitas itu memang sangat besar pengaruhnya. Kesamaan diantara perbedaan itu menjadi sebuah pengikat tersendiri yang membentuk kekuatan emosional”. (Wawancara KH. Muhtarom 26 Februari 2017)

Dari argumen di atas adat istiadat keagamaan yang sama antara kandidat dengan kiai di pesantren Al-Munawwir menjadi daya tarik tersendiri. Abdul Halim Muslih beberapa kali hadir dalam kegiatan atau tradisi keagamaan di Pesantren Al-Munawwir seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Haul (memperingati kematian) sesepuh pesantren dan kegiatan lainnya. Adat istiadat yang sering

dilakukan bersama antara Abdul Halim dengan Pesantren Al-Munawwir pada akhirnya menimbulkan ikatan emosional antara keduanya.

Poin utama dari faktor primordial ini adalah terjadi hubungan khusus antara Abdul Halim Muslih sebagai salah satu kandidat yang bersaing dalam Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 dengan Pesantren Al-Munawwir. Hubungan itu adalah hubungan patron klien antara kiai dan santri. Dengan karisma yang dimilikinya, kiai menduduki posisi kepemimpinan dalam lingkungannya. Kiai dihormati, disegani dan dipatuhi karena kedudukannya tersebut. Kedudukan seperti itulah yang disebut dengan patron, yaitu sebagai tempat bergantungnya santri dan masyarakat.

Klien dalam hubungan ini adalah Abdul Halim Muslih sebagai santri *kalong* di Pesantren Al-Munawwir yang juga turut meramaikan Pilkada Bantul tahun 2015 sebagai calon wakil bupati nomor urut satu. Santri kalong adalah istilah untuk seseorang yang mengaji atau terlibat dalam kegiatan pesantren, namun tidak menjadi santri yang bermukim atau menetap di pesantren. Abdul Halim seperti telah dijelaskan sebelumnya, sering mengikuti kegiatan di pesantren Al-Munawwir seperti Maulidan, Haul, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Hubungan patron klien (kiai-santri) inilah yang dalam penelitian ini menjadi faktor primordial. Secara tradisi pesantren, santri akan selalu meminta doa restu kepada kiai ketika mempunyai *hajat* (kepentingan) tertentu, begitu juga kiai akan merestui dan mendoakan selama niatan dari santrinya itu baik. Hubungan primordial patron klien ini menjadi salah satu alasan KH. Muhtarom mendukung Abdul Halim dalam Pilkada Bantul tahun 2015.

Sebagai pembanding, kasus serupa juga terjadi antara hubungan patron klien antara Rachmat Yasin dengan Pondok Pesantren Daruttafsir di Kabupaten Bogor. Studi yang dilakukan oleh Ramdani (2009) itu menjelaskan Yasin adalah kandidat yang bersaing dalam Pilkada Kabupaten Bogor 2008 serta merupakan santri kalong di Pesantren Daruttafsir. Yasin berasal dari Partai Persatuan Pembangunan yang dikenal memiliki relasi dengan Pesantren Daruttafsir. Hubungan patron klien itu menghasilkan restu dan dukungan dari pesantren tersebut hingga akhirnya Yasin berhasil menduduki kursi kekuasaan pada Pilkada Kabupaten Bogor 2008. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan primordial terutama patron klien kiai santri antara kandidat politik dengan kiai di pesantren bisa mempengaruhi perilaku politik khususnya bagi kiai itu sendiri.

B. Faktor Sakral dalam Perilaku Politik Kiai Pondok Pesantren Al-Munawwir

Setiap orang termasuk kiai lumrahnya memiliki suatu ideologi yang menjadu sakral dalam hidupnya. Kiai merupakan tokoh yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam terhadap ilmu agama, konsekuensinya adalah posisinya yang selalu mendapat perhatian terhadap pengajaran dan pengamalan ilmu yang dimilikinya. Perhatian yang dimaksud di atas adalah seorang kiai akan mendapat sistem penilaian ganda dibandingkan dengan masyarakat biasa manakala dia menyalahi norma dan nilai agama yang berlaku. Hal ini menjadi wajar karena persepsi yang timbul

di masyarakat adalah bahwa sudah sepatutnya kiai menjadi tokoh panutan bagi masyarakat karena dianggap lebih *'alim* (banyak ilmu) dan *shalih* (baik).

Agama dan negara di Indonesia tidaklah dapat dipisahkan karena amanat Ketuhanan menjadi sila nomer pertama dalam ideologi negara Indonesia termasuk dalam hal politik. Politik bisa menjadi alat kekuasaan untuk beragama dan begitu pula sebaliknya agama bisa menjadi salah satu jalan untuk berpolitik. Kesamaan identitas agama antara tokoh politik dengan tokoh agama menjadi salah satu hal yang paling sakral dan sangat dipertimbangkan dalam proses berpolitik. Kesamaan identitas agama itu akan mengikat erat sebuah tali emosional antara kandidat politik yang bersaing dengan kiai sebagai tokoh yang juga memiliki hak pilih dalam politik. Ikatan sakral ini terlihat jauh lebih kuat dibandingkan dengan ikatan primordial khususnya dikalangan pesantren termasuk Al-Munawwir, serta umumnya untuk umat Islam secara keseluruhan.

Kabupaten Bantul yang penduduknya mayoritas Muslim dipercaya masih sangat mempertimbangkan kesamaan identitas agama dalam urusan politik, terlebih Kabupaten Bantul dan DI Yogyakarta merupakan salah satu basis kuat organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Walaupun bukan organisasi politik, tetapi dua organisasi tersebut seolah-olah menjadi jaminan bahwa Kabupaten Bantul tidak akan kehabisan 'stok' untuk kader atau calon pemimpin umat di daerah. Setiap kandidat yang akan maju dalam sebuah pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah sudah sangat lazim akan mendatangi dua organisasi tersebut untuk meminta doa restu serta dukungan.

Tujuan akhirnya adalah dia menginginkan adanya dukungan suara langsung dari dua organisasi tersebut.

Pesantren menjadi salah satu basis massa umat Islam dan memiliki afiliasi dengan NU dan Muhammadiyah sebagai mayoritas tanpa mengenyampingkan organisasi Islam lainnya seperti Persis, PUI, HTI dan lain-lain. Afiliasi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pesantren memiliki basis massa yang cukup kuat dan masif. Seorang *nahdliyin* biasanya akan menyekolahkan putra-putrinya di lembaga pendidikan atau pesantren yang berafiliasi dengan NU, begitu juga anggota Muhammadiyah akan menitipkan anaknya di lembaga pendidikan binaan Muhammadiyah. Pesantren Al-Munawwir pun dikenal sebagai salah satu pesantren yang menjadi basis para *Nahdliyin* yang cukup berpengaruh khususnya di DI Yogyakarta.

Islam yang mayoritas di Kabupaten Bantul memang sudah sepatutnya dibuktikan dengan banyaknya pula kader daerah yang beragama Islam. Namun secara prinsip, terdapat doktrin-doktrin tertentu di dalam Agama Islam yang mengatur tata cara memilih pemimpin termasuk yang ditinjau dari bermacam segi termasuk kesamaan identitas keagamaan. KH. Muhtarom Ahmad menjelaskan:

“kalau kita melihat dari teks-teks ayat dalam Al-Qur’an memang seharusnya pemimpin bagi umat muslim itu adalah seorang muslim juga. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang mewajibkan demikian, salah satunya adalah QS. Al-Maidah ayat 51 yang ramai diperbincangkan. Terdapat perbedaan pendapat mengenai tafsir dalam ayat ini, terutama dalam kata *أَوْلِيَاءَ* (*auliya*). Ada yang menafsirkan sebagai teman dekat ada juga yang menafsirkan dengan pemimpin.

Menurut saya, logikanya jika teman dekat saja tidak boleh apalagi pemimpin. Pemimpin itu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang bagaimanapun manusia akan mementingkan kelompoknya. Apalagi jika rekam jejaknya merugikan umat Islam. Sebaiknya jangan pilih yang non muslim” (Wawancara KH. Muhtarom 26 Februari 2017)

Menurut beliau, Al-Qur’an Surah (QS) Al-Maidah: 51 sudah dengan *zhahir* (jelas) melarang Hamba Allah (muslim) untuk memilih pemimpin termasuk kepala daerah (pemimpin politik) yang beragama selain Islam. Ayat itu berbunyi:

يَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Dalam tafsir Ibnu Katsir di ceritakan bahwa Abu Musa Al-Asy’ari memiliki seorang sekretaris yang beragama Nasrani yang menurutnya adalah seseorang yang cerdas. Pada suatu hari Abu Musa diperintahkan untuk melaporkan catatan pemasukan dan pengeluaran kepada Umar Bin Khattab sebagai khalifah pada waktu itu. Pada akhirnya Umar mengetahui hal itu lalu kemudian membentak dan memukul paha Abu Musa Al-Asy’ari serta memerintahkan untuk memecat sekretarisnya. Umar kemudian membacakan QS. Al-Maidah: 51 tersebut kepada Abu Musa sebagai informasi mengenai larangan mengangkat non muslim sebagai wakil atau pemimpin.

Ayat di atas menjadi salah satu pedoman, pegangan dan doktrin yang mendalam kiai di Al-Munawwir dengan segala multitafsirnya. Menurut KH. Hafidz ayat ini berlaku bagi setiap umat Islam tanpa terkecuali, dimana pun dia berada. Terlebih di Kabupaten Bantul yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka jika semua umat muslim di Bantul mengamalkan ayat ini maka Bupati dan Wakil Bupati Bantul pasti beragama Islam.

Lebih lanjutnya KH. Hafidz Abdul Qodir sebagai penasehat Pesantren Al-Munawwir sekaligus pengasuh Komplek Huffadz 2 berpendapat:

“ayat ini kalau diamalkan oleh semua umat Islam di Bantul maka sudah pasti Bupatiya Muslim, sekiranya memang kemarin ada calon yang non Muslim pasti akan kalah dengan yang Muslim. Tapi Alhamdulillah pemilihan kemarin semua calonnya Muslim, jadi tidak ada ribut-ribut soal agama. Wajar saja kalau Muslim pilih Muslim, tidak masalah. Kalau kita berada di tempat yang mayoritas agamanya non muslim, maka kita harus pilih calon yang dekat dengan Islam, tidak memusuhi Islam dan memberikan kemaslahatan bagi semua orang termasuk Islam.” (Wawancara KH. Hafidz 5 Maret 2017)

Ikatan emosional dalam kesamaan identitas agama diperkuat dengan adanya doktrin melalui ayat-ayat agama. Beliau berkeyakinan bahwa kewajiban memilih pemimpin yang seiman harus dilaksanakan secara sadar sama seperti halnya kewajiban untuk melaksanakan shalat, puasa, haji dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Hal ini yang beliau jadikan dasar bersikap dalam setiap agenda politik.. Politik dan agama bukanlah hal yang terpisah karena dalam Islam, norma-norma dan tata kelola politik yang baik sudah digariskan dalam kitabnya serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad s.a.w yang dapat dikaji baik dengan menggunakan hadis maupun sejarah.

KH. Hafidz menambahkan bahwa memang terlihat adanya sentimental ketika para kiai mendakwahkan ayat-ayat Qur'an yang berkaitan dengan politik. Opini miring ini timbul ketika di pengajian-pengajian membahas tata cara berpolitik yang baik menurut Islam. Kalimat yang sering timbul adalah agama janganlah dibawa-bawa ke dalam urusan politik. Hal itu dinilai tidak etis, padahal sebaliknya Islam sebagai agama yang komprehensif mengajarkan tata cara hidup Islami. Keseharian seorang Muslim sudah digariskan sedemikian rupa sejak bangun tidur hingga ia kembali tidur. Terlebih urusan politik yang dampaknya akan mempengaruhi hidup orang banyak. KH. Hafidz menambahkan:

“kewajiban kita sesama Muslim adalah saling mengingatkan dan tugas para kiai dan pendakwah adalah menyampaikan. Tidak ada kaitan unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), karena memang ini perintah agama dan kita selaku Muslim punya hak untuk melaksanakannya. Hak ini sudah jelas dilindungi oleh undang-undang. Begitu juga jika memang di agama lain terdapat ajaran yang serupa, maka kita harus hormati ajaran itu.” (Wawancara KH. Hafidz 5 Maret 2017)

Sentimental itu dianggap wajar saja mengingat dunia politik memang seperti itu adanya, segala macam isu akan dengan sangat mudah diangkat ke permukaan apalagi jika itu terkait dengan identitas seseorang. Bagi KH Muhtarom agama menjadi identitas utama yang dipertimbangkan dalam politik meskipun ada pertimbangan identitas lainnya, oleh karena itu ayat Qur'an bagi mereka lebih tinggi kedudukannya daripada ayat konstitusi. Selain QS. Al-Maidah: 51 KH Muhtarom mengatakan bahwa terdapat ayat-ayat Qur'an lainnya yang jauh lebih tegas dan dijadikan pedoman dalam soal memilih pemimpin dan berpolitik. Ayat-ayat itu sedikit banyak mempengaruhi

perilaku politik umat Muslim terutama bagi seorang kiai yang mendalaminya. Diantara ayat-ayat itu adalah QS Ali Imran ayat 28, 118, 149-150, QS An-Nisaa ayat 138-139 dan ayat 144.

Ayat-ayat di atas menjadi dalil atau referensi pribadi bagi kiai Muhtarom Ahmad sebagai salah satu kiai di pesantren Al-Munawwir dalam hal menentukan pilihan dan sikap dalam sebuah kontestasi politik. Ayat-ayat tersebut juga sebagai doktrin ideologi untuk memilih pemimpin yang memiliki kesamaan ideologi agama, tidak hanya sekedar kesamaan identitas agama namun juga dapat dikhususkan lebih dalam kepada kesamaan tata cara beragama. Tata cara tersebut berkaitan dengan konsep Ketuhanan, konsep ibadah, hingga konsep kesamaan organisasi keagamaan. Lebih lanjutnya KH Muhtarom mengatakan:

“syarat utama pemimpin bagi umat Islam adalah dia harus beragama Islam, tapi itu hanya sebagai dasar atau tahap awal saja. Masih banyak syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi klasifikasi sebagai pemimpin seperti shidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan atau transparan) serta fathanah (cerdas). Intinya harus berusaha untuk mengikuti kepemimpinan Nabi Muhammad s.a.w. meskipun dia Islam tapi kalau ia tidak jujur, maka dia tidak layak jadi pemimpin karena tidak memenuhi syarat. Kalau dia tidak cerdas juga jangan dipilih karena seorang pemimpin harus paham segala bentuk masalah yang ada dan tau cara menyelesaikannya.” (Wawancara KH. Muhtarom 26 Februari 2017)

Lewat argumennya beliau ingin menjelaskan bahwa memilih pemimpin itu bukanlah perkara yang mudah, kesamaan identitas agama bukanlah syarat tunggal serta masih banyak hal-hal lain yang harus dipertimbangkan sehingga pemimpin yang terpilih adalah yang terbaik. Mengenal, mempelajari dan menelusuri rekam jejak dari calon atau kandidat menjadi hal yang harus

dilakukan maka dengan demikian budaya *money politic* (politik uang) juga bisa diminimalisir. Bukan hanya bagi partai politik saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama bagi kita semua untuk mengangkat dan memunculkan calon-calon atau kandidat politik yang terbaik dan berkualitas.

Terkait dengan Pilkada Bantul 2015, Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bantul menjadi ajang bagi salah satu *Nahdliyin*, maka hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pesantren Al-Munawwir. Secara identitas keagamaan, pemilihan yang terdiri dari dua pasangan calon ini secara keseluruhan memang memiliki identitas yang sama yaitu sebagai penganut agama Islam. Kesamaan ini berdampak positif pada minimnya isu identitas keagamaan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bantul tahun 2015 yang lalu. Namun disamping itu semua, faktor kesamaan identitas keagamaan secara lebih mendalam tentu dipertimbangkan, sebagai bukti adalah KH Muhtarom Ahmad yang menyebutkan bahwa beliau memilih pasangan nomor urut 1 (Suharsono-Halim) karena Halim adalah seorang santri dan sering terlibat dalam acara atau kegiatan di pesantren. Secara lebih spesifik, terdapat kesamaan antara Abdul Halim dengan Pesantren Al-Munawwir dalam pandangan keagamaan. Pandangan keagamaan yang dimaksud berupa *mazhab* yang didalamnya mencakup cara ibadah, rangkaian dan kegiatan ibadah khusus yang melekat dengan tradisi para *nahdliyin* seperti peringatan Maulid Nabi, Muharram dan Haul sesepuh pesantren.

Hal menarik lainnya adalah budaya patriarki dalam sebuah struktur sosial termasuk di kalangan kiai. Telah diketahui bersama bahwa Pilkada

Kabupaten Bantul 2015 itu turut diikuti oleh seorang perempuan petahana bernama Sri Surya Widati. Perspektif di kalangan ulama secara ideologis dan sakral mengenai boleh atau tidaknya seorang perempuan untuk menjadi pejabat politik sampai saat ini memang masih mengalami masalah khilafiyah (perbedaan pendapat). Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tafsir mengenai ayat-ayat tertentu dalam Al-qur'an mengenai kepemimpinan wanita di atas laki-laki, salah satu contohnya adalah QS An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) dari sebahagian yang lain (perempuan). Selain itu terdapat pula hadis shahih Nabi riwayat Imam Bukhari yang berbunyi: "tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita". Mengenai hal yang demikian, KH Muhtarom berpendapat:

“perihal kepemimpinan politik wanita memang sampai saat ini masih mengalami perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang keras. Masing-masing memiliki argumen sebagai penunjang dari pandangannya. Ulama konservatif yang melarang biasanya berpegangan pada ayat mengenai keutamaan laki-laki, sedangkan ulama yang membolehkan kepemimpinan wanita biasanya berpegangan pada kisah Ratu Balqis yang diceritakan kesuksesannya dalam Al-Qur'an. Saya pribadi lebih cenderung mengutamakan laki-laki tapi tidak mengharamkan jika ada perempuan yang layak dan kompeten” (wawancara KH Muhtarom 11 Mei 2017)

Argumen beliau itu didasarkan pada QS. An-Naml ayat 23-44 yang menceritakan kisah kesuksesan Ratu Balqis yang memimpin negeri Saba, namun tidak dibalut oleh larangan mengenai kepemimpinan wanita. Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada larangan yang konkret mengenai

kepemimpinan wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari di atas juga berkaitan dengan kerajaan persia atas diangkatnya Putri Kisra sebagai raja. Selain itu alasan lain para ulama membolehkan kepemimpinan wanita adalah didasarkan historis bahwa Aisyah (istri Nabi Muhammad s.a.w pernah memimpin Perang Jamal).

Dalam konteks Pilkada Bantul 2015, keikutsertaan Sri Surya Widati tidak dinilai sebagai suatu masalah, karena menurut undang-undang yang berlaku keikutsertaannya sah dan tidak cacat hukum. Kiai-kiai di Al-Munawwir tidak memandang hal itu sebagai sebuah pelanggaran hukum agama, meskipun memang terdapat perbedaan pendapat terkait ayat atau doktrin agama mengenai boleh atau tidaknya kepemimpinan wanita. Nahdlatul Ulama (NU) sendiri sebagai organisasi yang berafiliasi dengan Al-Munawwir berbeda pendapat mengenai hal ini.

Pada Konferensi Besar Syuriyah NU di Surabaya tanggal 19 Maret 1957 memutuskan bahwa perempuan boleh ikut serta ke dalam lembaga permusyawaratan untuk menentukan hukum dengan syarat-syarat yaitu bisa menjaga diri (*'afifah*), mempunyai kapabilitas, menutup aurat, mendapatkan izin dari yang berhak memberikan izin, aman dari fitnah dan tidak menjadi sebab dari timbulnya kemungkaran menurut *syara'* (Fuqaha, 2011: 296). Hal ini sejak lama masih jadi pergulatan faksi di tubuh internal NU. Para aktivis pembaharu NU mendorong kesetaraan gender dalam berbagai forum NU misalnya dalam Muktamar ke 30 di Lirboyo tahun 1999, terdapat nama-nama yang memperjuangkan seperti KH. Said Aqil Siradj, KH. Said Agil Munawar,

KH. Ahmad Machasin dan lain-lain. Selain itu nama besar KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sudah dikenal sejak lama dalam hal ini. Mereka memperjuangkan di atas prinsip moderasi, keseimbangan dan toleransi. Pendapat-pendapat di atas yang juga menjadi prinsip bagi kiai-kia di Al-Munawwir.

Seperti yang telah dijelaskan KH Muhtarom sebelumnya bahwa kesamaan identitas agama secara keseluruhan bukanlah menjadi titik akhir dalam menentukan pilihan politik bagi seorang kiai, identitas ke-Islamannya harus dapat dicerminkan dan dipertanggungjawabkan dalam perilaku sehari-hari serta dapat mengadopsi nilai-nilai Islam ke dalam sistem pemerintahannya manakala ia terpilih. Dengan demikian, secara individual kiai tidak akan merasa terbebani serta dengan lapang dada akan menerima apapun hasil yang didapatkannya. Terlebih jika pilihannya berhasil menduduki kursi kepemimpinan, maka rasa percaya terhadap pemerintahan yang sah akan tinggi dengan harapan akhir kotanya akan sejahtera.

Secara ideologi agama terlebih bagi umat Islam memang banyak dalil yang melarang untuk memilih pemimpin yang bukan beragama Islam, namun secara konsep kenegaraan doktrin itu tidaklah senada. Menurut Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tepatnya pada pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bersih, jujur dan adil sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan”. Terlihat seperti ada pertentangan dalam hal ini, namun bagi KH. Hafidz itu bukanlah masalah, beliau berpendapat:

“undang-undang memang membolehkan hak pilih dan dipilih bagi setiap orang, tapi kan menjalankan perintah agama juga dilindungi oleh undang-undang. Tidak masalah kalau menurut saya, yang bahaya itu kalau ini dibentur-benturkan sehingga menimbulkan konflik. Dasarnya kan memang wajar saja kalau kita pilih yang seiman, yang sekampung saja boleh masa seiman tidak boleh?” (Wawancara KH. Hafidz 5 Maret 2017)

Menurut beliau ideologi negara dalam hal ini bukan berarti dikesampingkan, artinya bahwa seorang pemimpin yang baik wajib hukumnya berkomitmen dan menjaga ideologi negara. KH. Muhtarom dalam hal ini menambahkan:

“bagi saya seorang pemimpin wajib hukumnya untuk setia kepada negara dan undang-undang dasar, sebagaimana ketika dia diambil sumpah jabatannya. Seorang presiden atau bupati misalnya, selain tunduk pada Allah harus tunduk juga pada undang-undang dan Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau dia melanggar bisa ramai, dan hilang kepercayaan padanya. Indonesia ini kan lahir selain atas perjuangan, juga karena adanya kesepakatan-kesepakatan yang telah dimusyawarahkan dan disepakati oleh orang-orang dulu. Undang-undang, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, bendera merah putih dan lain-lain, itu adalah suatu bentuk kesepakatan atau perjanjian yang teguh (مِيثَاقًا غَلِيظًا) (Wawancara KH. Muhtarom 26 Februari 2017)

Beliau menjelaskan bahwa seorang pemimpin muslim yang baik tentu akan memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Selama perjanjian itu tidak menyalahi nilai-nilai agama maka wajib hukumnya untuk disepakati. Pendapat KH Muhtarom ini mengacu pada Firman Allah Swt dalam penggalan surat Al-Maidah ayat 1, yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Aqad yang di maksud dalam ayat di atas adalah mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Ibnu abbas mengatakan bahwa aqad yang dimaksud adalah yang biasa dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian fakta pertahanan bersama dan lain-lainnya. Dalam ayat ini terdapat larangan untuk mengkhianati perjanjian-perjanjian yang dihalalkan. (Tafsir Ibnu Katsir)

Pernyataan KH Muhtarom terkait perintah untuk mentaati kesepakatan bersama (perjanjian) juga mengacu pada QS. Al-Isra ayat 34 yaitu:

..... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

“Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.”

Jika kalian berjanji kepada Allah atau kepada manusia lainnya, maka sesungguhnya janji-janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. (Tafsir Jalalain)

Lewat argumennya KH Muhtarom ingin menjelaskan bahwa segala komponen bangsa seperti Pancasila, UUD 1945, lambang negara, lagu kebangsaan dan lain sebagainya merupakan perjanjian yang disepakati oleh para *founding fathers* (pendiri bangsa) dan harus senantiasa dijaga. Oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang mempunyai komitmen yang kuat untuk menjaga dan mematuhi perjanjian-perjanjian tersebut. Seseorang dengan

ideologi negara menyimpang sebaiknya tidak dipilih karena lambat laun pasti akan menimbulkan kegaduhan. Pancasila sebagai ideologi negara yang sah di Republik Indonesia bisa menyentuh semua golongan dan tidak tertutup dari nilai-nilai Islam.

KH. Muhtarom menjelaskan perihal kesamaan identitas ideologi negara, memang cukup sulit untuk mendeteksi pandangan hidup seseorang mengenai falsafah bernegara karena memang nilai-nilai pancasila itu sendiri sudah mulai luntur. Lima sila yang sakral itu hanya ditekankan untuk sebatas dihafal saja sedangkan upaya pengamalannya terlihat minim. Usaha untuk mengenal identitas ideologi kenegaraan seorang tokoh politik bisa dilakukan dengan mencari rekam jejaknya dan lingkungan politiknya. Partai politik bisa menjadi salah satu objek yang dinilai guna mengetahui ideologi kenegaraannya.

Partai politik biasanya memiliki ideologi tertentu yang harus diikuti oleh seluruh kadernya, meski demikian bukanlah hal yang tidak mungkin jika kader yang ada di dalamnya memiliki perbedaan ideologi. Meski demikian usaha untuk mencari kesamaan identitas ideologi kenegaraan itu bisa saja dilakukan.

KH Hafidz menjelaskan:

“Pada kenyataannya, komitmen atas ideologi negara bukanlah isu yang sering diangkat ke permukaan, kebanyakan orang amat jarang menanyakan kandidat politik atas komitmennya terhadap pancasila. Barometer terhadap kesetiaan atas pancasila juga masih cukup sulit diukur. Begitu pula dalam agenda kampanye politik, isu pancasila bukanlah hal yang menarik untuk dikemukakan dan isu kesejahteraan menjadi hal yang prioritas”. (Wawancara KH Hafidz 5 Maret 2017)

Terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bantul di Pesantren Al-Munawwir, ideologi kenegaraan juga minim dari pembicaraan,

mengingat dua pasang calon yang bersaing pada saat itu diusung dan didukung oleh partai-partai yang tidak bermasalah secara ideologi kenegaraan. KH. Muhtarom menjelaskan:

“saya yakin bahwa dua pasang calon kemarin tidak aneh-aneh, tidak ada upaya untuk menjadikan Bantul sebagai daerah pemberontakan. Bantul akan tetap menjadi salah satu bagian dari NKRI, tidak ada istilah ingin dikomunikasikan ataupun di fundamentalkan Muslimnya. Kita ingin Bantul jadi kota yang Islami, tapi tidak perlu mengusik hal-hal yang sudah sejak dulu menjadi kesepakatan dari para pendahulu kita. Saya kenal dengan Pa Halim, ketika ngobrol juga tidak terlihat adanya ketidaksepahaman atas negara yang sudah ada saat ini. Fokus beliau adalah untuk menyelesaikan segala masalah yang ada di Kabupaten Bantul. Beliau juga seorang santri, sama seperti saya dan itu tidak menjadi alasan untuk menentang ideologi negara yang saat ini kita pegang. Pancasila itu kan memang jika kita hayati dan amalkan, tidak bertentangan dengan Islam. Sila pertama kan Ketuhanan Yang Maha Esa, itu persis dengan isi surah Al-Ikhlâs bahwa Tuhan atau Allah itu memang tunggal” (Wawancara KH. Muhtarom 26 Februari 2017)

Lewat argumennya beliau menjelaskan bahwa ideologi kenegaraan secara tidak sadar jarang dikemukakan, namun ideologi negara memang harus senantiasa dijaga karena ideologi itulah yang merekatkan berbagai perbedaan yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Segala macam perbedaan bisa diikat dengan semangat kita untuk terus menjunjung tinggi pancasila dan NKRI. Dapat disimpulkan meski tidak sebesar ideologi keagamaan, namun doktrin dan ideologi kenegaraan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku politik kiai di Pesantren Al-Munawwir.

Faktor sakral ini di dalamnya mencakup ideologi keagamaan dan ideologi kenegaraan. Faktor ini menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku politik kiai di Pesantren Al-Munawwir dalam Pilkada Bantul tahun 2015. Seperti

telah dijelaskan di atas bahwa terdapat kesamaan identitas antara kiai di Al-Munawwir dengan Abdul Halim sebagai salah satu kandidat. Secara spesifik identitas agama itu ditunjukkan dengan kesamaan sebagai seorang santri dengan latar belakang pesantren yang juga berbasis Nahdlatul Ulama (NU). Artinya bahwa kiai di Al-Munawwir akan lebih condong kepada seseorang yang berafiliasi dengan pesantren dan NU dalam sebuah agenda politik. Ideologi kenegaraan kiai di Al-Munawwir didasarkan pada latarbelakang kandidat dan sejauhmana komitmen untuk menjaga ideologi negara yang menjadi perjanjian antara *founding fathers*. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh para pendiri negeri ini.

C. Faktor Personal dalam Perilaku Politik Kiai Pondok Pesantren Al-Munawwir

Faktor personal dalam dunia politik bagi sebagian orang menjadi suatu hal yang sangat berpengaruh. Tidak sedikit terutama bagi masyarakat awam yang memilih pemimpin karena melihat seseorang yang diidolainya mengajak untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu. Konsekuensinya adalah dia menjadi pendukung dan bersikap secara buta karena tidak melalui pertimbangan-pertimbangan yang mendalam. Batasan faktor personal dalam penelitian ini adalah tokoh pesantren yang secara struktural dianggap lebih

senior dan dihormati oleh kiai-kiai lainnya yang ada di pesantren Al-Munawwir.

Pentingnya sosok personal yang dianggap bisa memengaruhi perilaku politik seseorang memang disadari betul oleh setiap aktor politik. Hal ini bisa kita dicermati ketika partai-partai politik melakukan kampanye dengan menggandeng tokoh-tokoh seperti politisi, selebriti, hingga ustadz atau kiai. Tokoh-tokoh tersebut diharapkan dapat menjadi magnet tertentu untuk menggaet suara dari masyarakat. Kiai sebagai tokoh agama dianggap menjadi daya tarik tersendiri karena dikenal oleh banyak kalangan dan dianggap bisa menyentuh lapisan masyarakat yang sedikit alergi terhadap dunia politik.

Kedekatan seorang kiai dengan politisi menjadi dua mata pisau yang menghasilkan berbagai stigma di tengah masyarakat. Stigma positif timbul dengan opini bahwa kiai bisa sedikit banyak merubah dunia politik yang dikenal kotor sehingga kiai bisa diharapkan untuk menjadi filter agar bisa menghasilkan suatu aktivitas politik yang baik. Opini tersebut berbanding terbalik dengan anggapan lain yang mengatakan bahwa kiai yang ikut terjun ke dunia politik baik secara aktif maupun pasif, maka dia diibaratkan telah masuk ke dalam sebuah kubangan lumpur. Tanggapan yang lebih negatif adalah kiai tersebut pasti mengharapkan sesuatu dari tokoh politik yang didukungnya.

Menanggapi hal yang demikian, KH Hafidz menjelaskan:

“apa yang salah jika kita mengharapkan sesuatu dari seseorang yang kita dukung? Kan kita ingin tokoh yang kita dukung itu menghasilkan

sebuah perubahan, dapat mengibarkan bendera Islam dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kita dukung itu tidak boleh hanya sekedar mendukung, tapi kita harus yakin bahwa dialah yang terbaik dari semua pasangan yang tersedia. Setelah kita pertimbangkan mana yang terbaik, maka kita dukung lalu kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah karena Allah adalah pemegang kekuasaan yang sesungguhnya.” (Wawancara KH Hafidz 5 Maret 2017)

Hal itu menunjukkan bahwa kiai di Al-Munawwir bukanlah tipikal kiai yang acuh atau alergi pada dunia politik. Pertimbangan-pertimbangan tertentu menjadi wajar untuk menentukan sikap politik pada pemilihan kepala daerah karena jika memilih dengan sembarangan, maka pemimpin dipilih juga kemungkinan akan bekerja dengan sembarangan. Terkhusus jika dia adalah seorang tokoh yang mempunyai banyak pengikut, akan menjadi masalah jika dia menjerumuskan pengikutnya sedangkan ia tahu bahwa pilihannya itu adalah orang yang bermasalah.

Kiai adalah salah satu tokoh dan sedikit banyak akan diperhatikan para santri sebagai pengikutnya. Menjadi pertanyaan adalah mungkinkah jika kiai mengajak atau menuntut santrinya untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihannya? Memilih dan dipilih adalah hak individual bagi setiap orang dan undang-undang menjaminkannya. Al-Munawwir memang dikenal dekat dan menjadi rumah bagi para politisi terutama yang ia dekat dengan *Nahdliyin*. Al-Munawwir juga selalu terbuka untuk siapapun yang ingin berkunjung atau mengikuti kajian keagamaan yang setiap hari digelar di pesantren.

Mengikuti tokoh atau individu tertentu dalam menentukan pilihan politik memang tidak menjadi masalah secara proses demokrasi. Suara orang yang

memilih karena mengikuti akan disahkan sebagaimana orang yang memilih atas dasar pertimbangan sendiri. Terkait dengan hal ini, KH Muhtarom menyebutkan:

“dalam Islam kita dilarang taklid (mengikuti pendapat ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan landasan hukum dia melakukannya), begitu juga dalam politik, kalau kita tahu bahwa tokoh yang kita hormati memilih salah satu calon, maka jika kita ingin mengikutinya kita harus tahu terlebih dulu pertimbangan apa yang dia miliki sehingga dia memiliki pandangan seperti itu. Kalau kita sudah tahu dan alasannya ternyata baik, maka ikutilah. Walaupun memang pertimbangan pribadi akan jauh lebih baik” (Wawancara KH Muhtarom 26 Februari 2017)

Lebih jauhnya beliau menyebutkan bahwa jika kita ingin mengikuti sikap politik orang lain, maka dianjurkan untuk mengikuti orang yang memang sudah mendalami hal tersebut. Beliau menyampaikan penggalan ayat Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 43 sebagai berikut:

.....فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”

Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan yakni para ulama yang ahli dalam kitab taurat dan injil (Tafsir Jalalain)

Dengan demikian bahwa sebaiknya menanyakan sesuatu yang tidak diketahui langsung kepada ahlinya sehingga persoalannya menjadi terang benderang. Mengikuti pilihan politik seseorang tidak dilarang namun jauh lebih baik jika mengetahui terlebih dahulu landasan dan argumen yang mendukung dari seseorang yang diikutinya. Andaikata seorang kiai dijadikan

rujukan politik seseorang, maka bisa diterjemahkan bahwa kiai tersebut baginya dianggap memiliki pengetahuan yang lebih atas sikap politiknya.

Kiai sebagai salah satu tokoh masyarakat menjadi wajar jika memang dia diikuti sikap politiknya oleh banyak orang, namun menjadi pertanyaan apakah seorang kiai juga dipengaruhi oleh tokoh tertentu dalam menentukan sikap politiknya. KH. Muhtarom menjelaskan:

“tidak ada tokoh tertentu yang mempengaruhi pilihan saya, obrolan politik itu hanya sekedar dibahas di komunitas-komunitas saja. Pada akhirnya saya yang menentukan sendiri pilihan saya. Saya memilih karena merasa ada ikatan emosional saja. Di Al-Munawwir tidak ada istilah atau instruksi harus memilih si A atau si B, tapi memang biasanya orang tahu kalau di sini biasanya pilih yang punya kedekatan dengan pondok.” (Wawancara KH Muhtarom 26 Februari 2017)

KH. Hafidz menambahkan bahwa pesantren ini dikembangkan tidak hanya oleh satu individu saja melainkan oleh keluarga besar yang terus berupaya untuk menjaga eksistensi dari pesantren ini. Beliau berpendapat:

“di sini kan kiainya banyak, bukan cuma satu. Ada yang sekolah tinggi ada juga yang tidak. Politik itu urusan masing-masing, tidak bisa saling memaksakan kehendak. Kalau hanya sekedar mengajak ya boleh saja, tapi tidak boleh memaksa. Pesantren ini selalu terbuka, siapapun boleh datang kalau tujuannya baik. Tokoh politik juga silahkan saja kalau mau berkunjung, partai apapun pasti diterima. Tapi tidak ada jaminan bahwa keluarga besar pesantren akan memilihnya, karena satu kiai dengan kiai yang lain di sini bisa saja berbeda” (Wawancara KH Hafidz 5 Maret 2017)

Lewat argumennya KH. Hafidz menjelaskan bahwa Al-Munawwir sebagai salah satu pesantren yang meskipun menjadi basis Nahdlatul Ulama, namun tidak serta merta menginstruksikan keluarga besar pesantren untuk memilih atau condong ke individu tertentu. Secara struktural, Pesantren Al-Munawwir

dipimpin oleh KH. R. Muhammad Najib Abdul Qodir. Beliau bisa saja mengagregasikan dukungan pesantren untuk mendukung salah satu kandidat sehingga dengan kewenangannya secara personal pun keluarga besar pesantren akan ikut dan patuh. Namun hal itu tidak dilakukan sehingga suara pesantren tidak secara absolut diberikan kepada salah satu kandidat. KH. Muhtarom menambahkan:

“Obrolan politik biasa saja terjadi, namun tidak ada instruksi khusus dari pimpinan pesantren serta tidak ada doktrin politik khusus. Pada akhirnya urusan politik itu dikembalikan kepada setiap individu karena memang berpolitik itu adalah hak individu yang dijamin oleh undang-undang. Tetapi jika memang ada instruksi khusus, berarti ada pertimbangan tertentu dari pesantren yang sifatnya rahasia namun pasti untuk kemaslahatan bersama”. (Wawancara KH. Muhtarom 26 Februari 2017)

Melaui pendapatnya KH. Muhtarom menjelaskan bahwa Pesantren Al-Munawwir dalam Pilkada Bantul tahun 2015 secara lembaga tidak mengeluarkan himbauan atau anjuran untuk memilih salah satu kandidat sehingga dengan jelas tidak ada upaya untuk memenangkan salah satu pasangan. Namun secara lembaga pula, pesantren tidak akan menutup kemungkinan jika dalam suatu agenda politik tertentu, akan mengagregasi dan memobilisasi suara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Dalam artian, Al-Munawwir tidak menutup diri dari kegiatan atau agenda politik sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

Pesantren Al-Munawwir adalah pesantren yang moderat serta demokrat, tidak konservatif terhadap dinamika politik yang terjadi. Seperti dengan pesantren-pesantren lainnya, Al-Munawwir selalu terbuka terhadap semua

golongan. Dalam urusan politik, Al-Munawwir menjadi tempat yang nyaman bagi para politisi untuk mendapatkan dukungan publik meskipun mereka tahu bahwa diterimanya kunjungannya di pesantren ini tidak berarti konsolidasi yang mereka lakukan berjalan lancar. Secara kultural pesantren ini terbiasa menerima kunjungan karena menerima tamu dengan baik adalah salah satu ajaran agama. Namun bahasa politis pimpinan pesantren biasanya selalu terlihat dan terbaca, sehingga warga pesantren dapat mengerti perilaku politik yang ditunjukkan oleh pimpinan pesantren secara personal.

D. Faktor Sejarah dalam Perilaku Politik Kiai Pondok Pesantren Al-Munawwir

Sejarah dalam hal ini merupakan persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu yang menciptakan solidaritas, tekad dan tujuan yang sama. Persepsi sejarah yang sama antara kandidat politik yang bersaing dengan seseorang yang mempunyai hak pilih memungkinkan untuk mempengaruhi perilaku politik seseorang tersebut. Kesamaan identitas sejarah bisa dimanfaatkan oleh kandidat untuk memudahkan penjabarannya mengenai visi misi yang diperjuangkan. Sejarah kebangsaan di masa lalu contohnya, dalam peristiwa sejarah dibahas mengenai problematika sejak lalu serta upaya pemecahan masalah terhadap problem tersebut.

Bagian sejarah tersebut bukan hanya soal sejarah kenegaraan saja, melainkan juga sejarah keagamaan, sosial budaya serta sejarah politik itu sendiri. Sejarah merupakan hal yang tidak bisa dibohongi selama akses untuk

mencapainya lurus dan tidak ada pembelokkan terhadap masa lalu. Secara kebangsaan sejarah itu bisa dikaji sejak zaman perjuangan yang mana para *founding fathers* berjuang untuk memerdekakan nusantara yang dahulu dijajah oleh bangsa asing. Sejarah itu menghasilkan tujuan yang sama bagi generasi selanjutnya yaitu untuk memenuhi tujuan kemerdekaan itu sendiri sehingga sejarah yang telah diukir tidaklah menjadi sia-sia. Sejarah ini menghasilkan sebuah kesamaan identitas sehingga menimbulkan ikatan emosional tersendiri.

Begitu pula kesamaan identitas sejarah itu bisa diperoleh atas peristiwa sejarah keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Lima agama yang diakui di Indonesia, masing-masingnya tentu memiliki sejarah tertentu hingga saat ini menjadi alasan mengapa seseorang menganut ajaran agama tersebut. Sejarah agama yang telah terjadi tentu akan menghasilkan sebuah solidaritas antar sesama penganut agama sehingga timbul tekad untuk melestarikan sejarah tersebut.

Sejarah kelembagaan seperti Pesantren Al-Munawwir juga pada akhirnya akan dapat menghasilkan adanya satu ikatan emosional tertentu. Santri-santri yang belajar di pesantren Al-Munawwir tentu memiliki alasan mengapa ia memilih Al-Munawwir sebagai tempatnya ia belajar. Salah satu alasannya adalah sejarah, sejarah tidak akan bisa membohongi karena merupakan peristiwa yang telah terjadi. Seorang ayah mungkin menginginkan anaknya belajar di Al-munawwir karena ia mengetahui sejarah Al-Munawwir sehingga timbul alasan untuk menyekolahkan anaknya di pesantren Al-Munawwir. Hal

yang demikianlah yang dimaksud dengan ikatan emosional yang terbentuk karena adanya kesamaan identitas sejarah.

Terkait dengan politik, sejarah juga sedikit banyak menjadi alasan dan bahan pertimbangan seseorang untuk menentukan sikap politiknya. Dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bantul tahun 2015 KH. Muhtarom menjelaskan:

“sejarahnya mengatakan bahwa Bantul ini sejak dulu adalah mayoritas Muslim dan sukunya Jawa. Kalau kita mengikuti sejarah, ya begitulah Bantul yang masyarakatnya masih fanatik terhadap ajaran agama. Islam di Bantul itu kuat, NU dan Muhammadiyahnya juga kuat. Dua ormas ini saling bahu membahu menciptakan Bantul yang Islami. Begitulah secara sejarah, sejak dulu. Kalau misalkan ada kandidat yang non muslim malah bisa ribut, dan berarti itu menjadi sejarah baru.” (Wawancara KH Muhtarom 26 Februari 2017)

Sejarah dan eksistensi agama di Kabupaten Bantul masih cukup kental dan sulit untuk digeser sehingga persepsi masyarakat adalah identitas sejarah keagamaan menjadi prioritas untuk menjaga sejarah itu terus berlanjut di Kabupaten Bantul.

“kalau secara sejarah buat saya pribadi tidak ada pengaruh yang besar, karena hidup ini kan dinamis. Tapi sejarahnya memang Bantul itu Bupatinya Muslim, itu sangat dipertimbangkan. Tapi kalau ada non muslim yang ingin jadi Bupati Bantul ya silahkan saja, tapi kan nanti masyarakat yang menentukan. Sejarahnya di pesantren ini adalah dia yang dianggap memiliki banyak kemaslahatan untuk umat pasti didukung, tidak hanya oleh kiai tapi oleh semua orang”. (Wawancara KH. Hafidz 5 Maret 2017)

Lewat argumennya, KH Hafidz dan KH Muhtarom mencoba menjelaskan bahwa ada kesamaan sejarah bersama mengenai kepemimpinan. Secara

tersirat disadari betul bahwa Kabupaten Bantul selalu dipimpin oleh seorang muslim. Hal ini didasarkan kepada Kabupaten Bantul itu sendiri yang menjadi basis kuat bagi dua Ormas Islam di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Kaderisasi pemimpin dari kalangan muslim tidak akan terputus selama dua organisasi ini masih eksis di Kabupaten Bantul. Sejarah bersama juga timbul dari Abdul Halim sebagai seorang santri yang dekat dengan dunia pesantren termasuk Al-Munawwir. Beliau juga merupakan seorang yang berafiliasi dengan NU dan berasal dari partai yang sejalan dengan NU yaitu PKB.

Sejarah juga mencatat bahwa NU dari masa ke masa selalu terlibat dalam dunia politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Kader-kader dari NU itu sendiri tidak sedikit yang bergabung dengan partai politik dan melakukan politik praktis. Di Al-Munawwir misalnya terdapat nama KH Warson Munawwir dan Nyai Hj. Ida Fatimah Zaenalyang pernah menduduki kursi DPRD DIY. Dari peristiwa ini terlihat bahwa Pesantren Al-Munawwir baik secara aktif maupun pasif selalu terlibat dalam kegiatan politik. Secara aktif dan khusus yaitu dengan mendukung dan mengusung keluarga pesantren untuk maju dalam kontestasi politik. Secara umum yaitu sebagai basis massa NU dengan turut mendukung kader-kader NU yang bersaing dalam pilkada meski suaranya tidak mutlak.

NU secara historis tidak bisa dipisahkan dalam dinamika politik di Indonesia, studi lain yang dilakukan oleh Muaddab (2015) menjelaskan periodisasi peran NU dalam demokrasi politik di Indonesia dengan tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Dinamika NU dalam Demokrasi Indonesia

PERIODE	PERISTIWA
1926-1946	Periode pemerintah Kolonial Belanda, NU abstain terhadap politik
1942-1945	Periode pendudukan Jepang, masa dimana kiai mulai terlibat dalam politik.
1945-1949	Perjuangan kemerdekaan merupakan periode dimana NU terlibat secara aktif dan radikal dalam politik.
1949-1959	Masa demokrasi parlementer adalah perubahan penting NU dari organisasi sosial keagamaan menjadi partai politik, tetapi gagal memberikan dampak yang sepadan dengan besar jumlah pendukungnya.
1959-1965	Pada masa demokrasi terpimpin Soekarno, NU menjadi penyangga rezim otoriter populis, yang menyebabkan sejumlah konflik internal.
1965-1966	Pada masa transisi yang keras, NU mendefinisikan ulang perannya dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.
1967-1998	Selama masa orde baru Soeharto, NU untuk beberapa lama menampilkan diri sebagai kekuatan oposisi yang tegar, namun mengalami depolitisasi yang luar biasa.
1998-1999	Sejalan dengan pembukaan kran demokrasi, masa Orde Reformasi adalah masa transisi NU masuk kembali ke dalam negara, melalui pendirian partai PKB oleh elit PBNU.
1999-2001	Masa KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketua Umum PBNU menjadi presiden, NU masuk ke dalam negara menjadi pendukung utama pemerintah.
2001-2010	Masa perjuangan NU untuk masuk kembali ke dalam negara, ditandai dengan pencalonan KH. Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, menjadi cawapres, tetapi gagal. Namun sejumlah kader NU masuk ke dalam kabinet.

Sumber: Muaddab (2010)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa NU selalu memiliki peran dalam dinamika politik di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dapat dipastikan bahwa di setiap periode kabinet kepresidenan selalu ada

kader-kader NU yang menjabat baik sebagai menteri, staf khusus hingga penasihat kepresidenan. Begitu juga dalam dinamika politik di daerah, NU terlibat dalam agenda politik lokal dengan mengusung ataupun mendukung kader-kader NU yang bersaing dalam sebuah kontestasi politik di tingkat lokal. Dukungan itu bisa datang secara langsung dengan mendeklarasikan dukungan seperti yang dilakukan oleh Pesantren Al-Munawwir pada masa pemilu tahun 1999 dengan menyatakan dukungan pada Partai PKB, namun dukungan itu bisa juga secara tidak langsung dengan memberikan restu kepada kandidat yang bersaing seperti pada kasus Pilkada Bantul 2015 yang lalu. Kesamaan sejarah di masa lalu seperti yang telah dituliskan di atas membentuk adanya kesamaan tekad yang melahirkan suatu ikatan emosional. Ikatan emosional itulah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku politik kiai di pesantren Al-Munawwir.

E. Faktor Bhinneka Tunggal Ika dalam Perilaku Politik Kiai Pondok Pesantren Al-Munawwir

Bhinneka Tunggal Ika dipahami secara sederhana dengan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat yang berasal dari Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular. Sutasoma mengajarkan nilai-nilai toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Budha semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kalimat sakral itu kemudian diadopsi menjadi semboyan negara dan disisipkan pada lambang burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia.

Indonesia yang penduduknya heterogen karena terdiri dari berbagai macam agaman suku, ras, dan bahasa menjadi rawan terpecah belah pasca kemerdekaannya karena berbedanya identitas sakral dan primordial tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan adanya upaya bersama untuk menjaga stabilitas kebangsaan sehingga segala bentuk perpecahan itu bisa diminimalisir. Bhinneka Tunggal Ika hadir sebagai bentuk usaha untuk menjaga persatuan bangsa, dengan harapan jika semua menghayati nilai-nilai kebhinekaan tersebut maka keragaman itu tidak akan menjadi soal serta menjadi khazanah kekayaan bangsa.

Keberagaman yang sudah tercipta sudah sejak lama itu memang bisa menjadi isu yang sensitif jika dikonotasikan ke dalam hal-hal yang negatif. Egoisme atas perbedaan serta adanya rasa jumawa sehingga merasa lebih baik dan terhormat dari kelompok lain yang berbeda menjadi alasan terkuat retaknya keberagaman tersebut. Oleh karena itu kebhinekaan tersebut tidaklah hanya untuk dijadikan semboyan semata melainkan perlu dihayati dan diresapi.

Perbedaan sakral seperti agama dan primordial seperti suku, ras dan bahasa merupakan salah satu komponen kekayaan bangsa dan menjadi kekuatan tersendiri bagi negara Indonesia. KH. Muhtarom menjelaskan bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah fitrah dan sudah menjadi ketentuan Allah sebagai pencipta. Menjelaskan hal ini beliau mengacu pada Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl (16) ayat 93:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ ۗ وَلِتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”.

Niscaya Allah merukunkan diantara sesama dan tentulah Dia tidak akan menjadikan perselisihan, permusuhan dan perdebatan diantara kalian. Tetapi mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang diberi Rahmat oleh Allah. (Tafsir Ibnu Katsir)

Ayat di atas menjadi pedoman untuk menyikapi segala perbedaan yang ada di negara ini, terutama bagi umat Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia umumnya dan khususnya di Kabupaten Bantul. Perbedaan-perbedaan yang ada bukanlah menjadi alasan untuk menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan, maka dengan demikian Indonesia bisa berkembang dengan lebih manusiawi melalui gotong royong dari rakyatnya yang berbeda-beda itu.

Menurut KH. Hafidz, bagi umat Islam perbedaan itu malah akan menjadi nilai ibadah jika disikapi dengan bijak. Pernyataan beliau mengacu pada Firman Allah Swt surah Al-Hujuraat (49) ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Pada garis besarnya semua manusia sama saja, berasal dari satu ayah dan ibu yaitu Adam dan Hawa dan dijadikan beraneka ragam bangsa-bangsa dengan tujuan untuk saling mengenal diantara sesamanya. Perbedaan keutamaan di sisi Allah Swt hanyalah dengan ketaqwaan bukan karena keturunan dan kedudukan. (Tafsir Ibnu Katsir)

Ayat di atas menjadi rujukan pengganti dari kalimat *Bhinneka Tunggal Ika* dan bagi umat Islam menjadi nilai ibadah jika dibaca dan diamalkan. Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa perbedaan primordial bukanlah hal yang patut untuk diperdebatkan, karena tugas manusia adalah untuk mentoleransi perbedaan itu dan untuk saling mengenal satu sama lain. Melalui upaya pengenalan atas perbedaan itu, maka akan tercipta suatu ikatan kekeluargaan yang nantinya menimbulkan pula semangat kebersamaan.

Berkaitan dengan urusan politik, menjadi suatu pertanyaan ketika sebelumnya telah dibahas bahwa dalam urusan politik bagi umat Islam wajib hukumnya untuk memilih pemimpin yang beragama Islam. Di satu sisi timbul opini bahwa Islam tidak mentoleransi perbedaan dan merasa sebagai kelompok terbaik yang dapat mengelola negeri Indonesia. KH. Hafidz menjawab:

“urusan memilih pemimpin dan politik dalam Islam adalah urusan ibadah, kalau dalam Al-Qur’an atau hadis ada tuntunan berupa perintah atau larangan, maka itu jadi nilai ibadah, bukan nilai sosial. Hubungannya antara seorang hamba dengan Tuhannya, bukan seseorang dengan orang lain. Inilah yang disebut dengan toleransi, begitu pula jika agama lain memiliki peraturan yang sama, maka kerjakanlah dan kita selaku umat Islam harus bisa menghormati.” (Wawancara KH Hafidz 5 Maret 2016)

Beliau menjelaskan bahwa sentimental terjadi manakala mengaitkan isu politik dengan isu keagamaan mengingat Islam sebagai agama mayoritas memiliki doktrin tertentu dalam hal politik. Doktrin tersebut dianggap bisa mengganggu iklim persaingan politik yang sehat dan bisa membunuh mimpi anak-anak non muslim yang bercita-cita untuk menjadi pemimpin politik. KH. Muhtarom menambahkan:

“memilih pemimpin itu ibadah, ada perintahnya. Jangankan urusan politik, ketika melakukan perjalanan saja maka salah seorang harusnya dipilih sebagai pemimpin di perjalanan. Apalagi pemimpin politik yang segala urusan kenegaraan kita serahkan padanya, bahkan nilai-nilai keagamaan pun bisa dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin. Bukan berarti tidak mau bersaing dengan sehat, karena memang aturan agamanya seperti itu. Kalau mau bersaing sehat ya berarti biarlah orang kalau mau pilih pemimpin sesuai agamanya, itu kan haknya dia.” (Wawancara KH Muhtarom, 26 Februari 2017).

Beliau berpendapat bahwa kebanyakan orang yang mengaku dari golongan nasionalis tidak sepaham dengan doktrin agama tersebut, sekalipun dia beragama Islam. Namun itu tidaklah menjadi soal karena itu merupakan urusan pribadinya dengan Tuhannya. Tetapi ketika dia mengultimatum bahwa memilih pemimpin berdasarkan agamanya itu memecah belah bangsa dan tidak adil, maka sejatinya dia telah keluar dari prinsip nasionalisme itu sendiri.

KH. Muhtarom lebih lanjut menjelaskan:

“di negara demokrasi memilih pemimpin berdasarkan agama ya boleh-boleh saja, tidak berdasarkan agama pun tidak masalah. Suaranya juga sah-sah saja, memilih pemimpin karena fisiknya pun boleh apalagi karena agamanya? Tapi itu kan urusan konstitusi negara, kalau konstitusi agamanya kan buat Islam harus mendahulukan yang Islam dulu. Bung Karno pun mengajak untuk bersaing sehat dalam pidatonya 1 Juni 1945, dan itu fair!”(Wawancara KH. Muhtarom 26 Februari 2017)

Pidato yang dimaksud oleh KH Muhtarom tersebut adalah pidato pada tanggal 1 Juni 1945 atau yang dikenal sebagai hari lahirnya pancasila tepatnya dalam rumusan pancasila versi Soekarno di sila ke tiga yaitu mufakat, Bung Karno berpidato sebagai berikut:

“Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam, maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna, tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar-supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar didalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan Rakyat 100 orang anggautanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60,70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja.

Sumber: Website PDI Perjuangan www.pdiperjuangan.id diakses 9 Maret 2017 jam 16.00

Lewat penggalan pidato itu penggalan pidato di atas Bung Karno mengajak untuk masing-masing agama saling bersaing secara sehat untuk merebut kekuasaan di Badan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian maka

produk hukum yang dihasilkan pada masa pemerintahan itu pun akan bernuansa agama dengan dilalui proses yang adil dan bijaksana. Doktrin di atas menjadi salah satu pegangan khususnya bagi KH Muhtarom perihal boleh tidaknya mempertimbangkan isu keagamaan dalam memilih pemimpin. Beliau menyimpulkan bahwa tidak ada kontradiksi antara negara dengan agama Islam khususnya untuk menjadikan identitas keagamaan sebagai bahan pertimbangan dalam berpolitik. Hal itu juga diyakini tidak akan mempengaruhi kebhinekaan yang sudah sejak lama dijunjung tinggi di Indonesia.

Terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul tahun 2015, tidaklah muncul soal isu menjaga kebhinekaan dalam proses demokrasi tersebut. Terlebih bahwa kedua pasang calon yang bersaing tersebut memiliki banyak kesamaan identitas sakral dan primordial. Tidak sulit bagi kiai di Al-Munawwir untuk menentukan pilihan mengingat adanya keyakinan bahwa kedua pasangan calon memiliki komitmen untuk menjaga keberagaman yang ada di Kabupaten Bantul. KH. Hafidz menjelaskan:

“di Bantul itu yang lebih banyak diperbincangkan bukan soal keberagaman, tapi lebih ke ekonomi dan budaya. Agama sudah jelas mayoritas muslim tidak akan ribut, NU Muhammadiyahnya kuat, yang terpenting itu biaya-biaya murah, kesehatan murah, anak-anak bisa sekolah, kotanya aman. Kalau itu semua sudah tercapai, ada keberagaman dan perbedaan tidak akan jadi masalah”. (Wawancara KH Hafidz 5 Maret 2016)

Lewat argumennya KH Hafidz mencoba menjelaskan bahwa isu kebhinekaan itu biasanya timbul di daerah yang heterogen, lain halnya dengan

di Kabupaten Bantul yang penduduknya mayoritas beragama muslim. Kebhinekaan itu masih dijunjung tinggi dengan segala unsur kekuatan agama, sosial, ekonomi dan budaya yang masih terjalin erat satu sama lain dalam bingkai toleransi. Dalam ajaran Islam itu sendiri beliau menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk berbuat baik dan adil kepada semua manusia walaupun dia berbeda agama, hal ini mengacu pada QS. Al-Mumtahanah ayat 8 yang terjemahnya berbunyi:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”

KH Hafidz menjelaskan dalam memahami ayat di atas bahwa sesungguhnya ajaran Islam sangat menghargai adanya perbedaan, karena memang perbedaan adalah suatu keniscayaan dan ketentuan Allah. Dalam perbedaan itu kita dituntut untuk saling berbuat baik antar sesama. Namun dalam hal politik, ada ayat-ayat lain yang menjadi pengecualian sehingga umat muslim dilarang untuk menjadikan orang non muslim sebagai pemimpinnya. Hal yang demikian tidak berarti merusak kebhinekaan karena merupakan ajaran agama dan setiap warga negara berhak menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Dalam Pilkada Bantul tahun 2015 KH Hafidz menyebutkan bahwa di Pesantren Al-Munawwir yang berbasis NU itu tidak secara terbuka mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon, satu kiai

dengan kiai lainnya bisa saja terdapat perbedaan pilihan, hal itu berdasarkan penilaian dan keyakinan pribadi serta setiap kiai mempunyai pilihannya masing-masing. Prinsip yang demikian sudah menjadi kebiasaan kiai-kiai NU yang dalam urusan politik satu sama lain sering terjadi perbedaan. Terlebih saat Pilkada Bantul 2015 tidak ada instruksi dari pimpinan pesantren untuk menyalurkan suara kepada salah satu pasangan calon.

F. Faktor Ekonomi dalam Perilaku Politik Kiai Pondok Pesantren Al-Munawwir

Dalam faktor ekonomi inilah yang menimbulkan adanya kegelisahan di tengah dunia pesantren, kiai sebagai elit agama sejatinya harus menjaga moral pribadi dan lembaga agar bisa menyampaikan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan agama, moral dan karakter. Kekhawatiran muncul akan terjadinya politik transaksional yang melibatkan kiai baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan itu akan menimbulkan deligitimasi peran pesantren sebagai otoritas moral dan referensi keagamaan. Namun telah menjadi rahasia umum bahwa politik pada ujungnya adalah untuk memperjuangkan ekonomi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Identitas ekonomi pada perkembangannya didasarkan oleh variasi pekerjaan atau mata pencaharian sehingga bahasa politik yang muncul pun adalah untuk memperjuangkan variasi mata pencaharian tersebut. Pada masa kampanye sering kandidat politik berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru, petani, nelayan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga kesejahteraan

tenaga pengajar pendidikan Islam di pesantren. Meski demikian hal tersebut dianggap sah sehingga menjadi bahan pertimbangan politik seseorang, mengingat dengan adanya sebuah jaminan setidaknya memberikan rasa aman terhadap eksistensi pekerjaan yang digelutinya.

Ekonomi merupakan nilai yang tidak bisa distandarisasikan antara satu orang dengan yang lainnya karena kepuasan secara ekonomi hanya menjadi milik dari individu. Peran dari politik itulah yang salah satunya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi sehingga tercipta suatu iklim ekonomi yang sehat di tengah masyarakat. Pemilihan kepala daerah juga merupakan alat untuk melancarkan segala aktivitas perekonomian baik individu maupun kelompok.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul yang dilaksanakan tahun 2015 lalu tidak sepi pula dari urusan ekonomi. Variasi pekerjaan yang timbul dalam sebuah struktur ekonomi menjadikan adanya sebuah ikatan emosional antara kelompok yang memiliki kesamaan identitas ekonomi. KH. Hafidz berpendapat:

“ekonomi ya pasti sangat berpengaruh, lazimnya orang ingin sejahtera. Seorang petani ya wajar jika menginginkan bupatinya peduli terhadap petani dan pertanian. Seorang nelayan ingin ada bantuan kapal nelayan, seorang guru ingin ditingkatkan kesejahteraannya, polisi ingin sejahtera semua ingin sejahtera. Maka pemimpin wajib mengakomodir kesejahteraan bagi semua kalangan. Kalau kiai di pesantren biasanya ga macem-macem, ada perhatian terhadap dunia pesantren saja sudah sukur. Kita hanya ingin pendidikan agama didukung, sama seperti pendidikan umum” (Wawancara KH. Hafidz 5 Marret 2016).

Lewat argumennya beliau mencoba menjelaskan bahwa kedekatan seorang tokoh politik dengan berbagai komponen tentu akan menjadi nilai tambah tersendiri. Kedekatan itu yang menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk

mempercayainya sebagai seseorang yang nantinya akan mengatur kebijakan. Kebijakan itu bisa saja memberikan kerugian atau keuntungan baginya, maka kontrak politik biasanya dilakukan sebelum masa pemilihan agar kebijakan yang nantinya diundang-undangkan adalah kebijakan yang menguntungkan baginya dan kelompoknya. Pada proses inilah biasanya rawan terjadi pelanggaran dalam proses berdemokrasi, dan jika ditelusuri biasanya pelanggaran itu selalu bermotif ekonomi.

Terkait dengan faktor ekonomi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul pun tidak lepas dari adanya pelanggaran, berbagai kasus timbul seperti soal urusan teknis hingga adanya *money politic* (politik uang) untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu. Berbagai kasus *money politic* terjadi pada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015. Artinya bahwa urusan ekonomi masih sangat berpengaruh atas sikap dan perilaku politik seseorang. Karena faktor ekonomi, seseorang bisa kehilangan idealitasnya dan melakukan cara-cara yang pada dasarnya dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, peran serta kiai ke dalam dunia politik baik aktif maupun pasif diiringi dengan adanya stigma positif dan negatif. Harapan positifnya adalah seorang kiai diharapkan dapat menjernihkan proses politik yang selama ini dikenal kotor. Kiai diharapkan dapat menjadi filter di mata air sehingga air yang mengalir itu menjadi bersih dalam artian proses dan sistem politik menjadi lebih baik. Namun opini negatif juga muncul karena atas dasar ekonomi, dikhawatirkan bahwa harapan

itu tidak tercapai dan kiai tersebut malah menjadi bagian kotor dari air yang mengalir tersebut.

KH. Hafidz berpendapat bahwa *money politic* itu termasuk pada hukum suap menyuap, dan dalam Islam haram hukumnya. Sebagaimana Nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda bahwa seseorang yang menyuap dan menerima suap akan berada di neraka. Suap menyuap ini biasanya terjadi antara kandidat dengan seseorang yang mempunyai hak pilih. Kandidat akan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan tujuan agar dia memilihnya dalam proses pemilihan umum. Begitu juga sebaliknya, seseorang bisa saja menyuap kandidat politik dengan membiayai proses kampanye dan segala aktivitas politiknya. Harapannya dia akan mendapatkan imbalan tertentu manakala kandidat yang disuapnya itu terpilih. Imbalan itu bisa berupa akses ke pemerintahan, jabatan tertentu hingga pengembangan usaha yang pada ujungnya berkaitan dengan masalah ekonomi.

Faktor ekonomi dalam kegiatan politik di Pesantren Al-Munawwir memang bisa terlihat meskipun pihak pesantren menolak bahwa kegiatan politik di pesantren adalah sebagai bentuk kompensasi ekonomi. KH. Muhtarom menjelaskan:

“umumnya orang sudah pada tahu kalau tokoh politik datang ke pesantren biasanya akan meminta dukungan, tapi orang tidak tahu komunikasi politik seperti apa yang terjadi di dalamnya. Tapi bagi saya sah-sah saja jika memilih orang yang mempunyai komitmen untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam. Tidak hanya di Al-Munawwir saja tetapi juga di tempat-tempat lain.” (Wawancara KH. Muhtarom 26 Februari 2017)

Di tengah pengaruh sosial dan politik yang berkembang di masyarakat, istilah kompensasi ekonomi memang sedikit kurang nyaman disematkan. Namun fakta tentang adanya bantuan-bantuan kepada pesantren juga diakui. Donasi dari kelompok politik diterima oleh Al-Munawwir terutama pada era kepemimpinan KH. Ali Maksum yang dekat dengan tokoh-tokoh politik dari kalangan *Nahdlatul Ulama*. Suatu hal yang logis jika terdapat bantuan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Pesantren Al-Munawwir mengingat pesantren ini menjadi salah satu pihak yang merintis berdirinya partai tersebut. Salah satu tokoh politik yang banyak membantu pesantren Al-Munawwir adalah Alwi Shihab (Ketua DPP PKB 1999-2004). Selain memberikan bantuan langsung Alwi dan elit PKB lainnya juga turut memfasilitasi doantur-donatur dari Timur Tengah untuk pembangunan mesjid dan bangunan lainnya. (Rokhim: 2016)

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015 yang lalu, pasangan Suharsono-Halim menjadi pemenang dengan mengalahkan pasangan Sri Surya Widati-Misbakhul Munir. Suharsono-Halim diusung oleh Gerindra dan PKB, hal ini tentu berkaitan dengan Pesantren Al-Munawwir yang dikenal dekat dengan PKB terlebih Abdul Halim Muslih merupakan ketua DPC PKB Kabupaten Bantul. Dialog ekonomi politik bisa saja terjadi antara Halim dengan Pesantren Al-Munawwir, namun ketika ditanya mengenai hal itu KH. Muhtarom menjawab:

“saya pribadi tidak ada urusan ekonomi dengan beliau, sejak awal saya kenal beliau sebagai seorang santri, sama seperti saya. Hal itulah yang membentuk ikatan emosional, harapannya kan memang jika dia

seorang santri bisa lebih agamis lagi dalam memimpin Bantul. Beliau juga sudah lama tinggal di Bantul, tahu masalah apa yang ada di Bantul. Tapi memang umumnya orang beranggapan bahwa Al-Munawwir dekat dengan PKB dan jika memang ada bantuan dalam bentuk apapun baik itu dari PKB atau dari siapapun ya diterima saja, selama dia ikhlas untuk beramal sholeh dan mendorong kemajuan lembaga pendidikan Islam”. (Wawancara KH Muhtarom 26 Februari 2017).

Lewat argunennya KH Muhtarom mencoba menjelaskan bahwa keputusannya untuk memberikan suara kepada pasangan Suharsono – Halim tidak didasarkan pada kontrak politik tertentu yang bermuara pada faktor ekonomi. Keputusannya itu berdasarkan pada hubungan patron klien antara kiai dan santri antara Pesantren Al-Munawwir dengan Abdul Halim. Meski demikian beliau tidak menampik bahwa Pesantren Al-Munawwir pernah mendapatkan bantuan dari partai politik maupun pejabat politik tertentu. Studi kasus lainnya yang ditulis oleh Rijal (2013) menjelaskan kompensasi ekonomi dan politik pragmatis di pesantren. Terdapat beberapa karakteristik kiai dalam mendukung atau menentukan kemenangan bagi calon pejabat publik yaitu:

1. Kiai yang berani terjun langsung sehingga sangat mendukung perolehan suara pasangan calon yang didukungnya. Implikasi dari tipe ini nyata dalam perubahan pesantren dan pundi-pundi kekayaan kiai akan bertambah dengan sendirinya. Selain itu, jaringan kiai dengan kekuasaan (pemerintah) akan semakin kokoh sehingga peran dan posisi kiai di tengah masyarakat akan kokoh pula. Meski demikian dukungan tersebut seperti yang telah dijelaskan oleh KH Muhtarom dan KH Hafidz pada dasarnya berorientasi pada faktor sakral. Perihal nantinya ada hadiah yang diberikan

oleh pasangan calon kepada kiai semata-mata merupakan ucapan terima kasih, dan bukan tujuan utama dalam berpolitik.

2. Kiai yang canggung dalam berpolitik, kiai tipe ini kurang dapat mendukung perjuangan memperoleh kemenangan bagi kandidat yang didukungnya. Misalkan pesantren mendapat bantuan dari kandidat saat masa kampanye, namun kelanjutan bantuan akan terhenti karena kandidat yang didukung oleh kiai tersebut tidak mendapatkan jabatan strategis di pemerintahan. Meski demikian jaringan pribadi antar kandidat dengan pesantren masih bisa terjalin.
3. Kiai yang secara kultural mengharuskan dirinya untuk menyerahkan pilihan politik masyarakat secara utuh, artinya kiai tipe ini hanya menjadi jembatan penghubung dengan masyarakat, kewajiban untuk meyakinkan dan menindaklanjuti apa yang telah dilakukan oleh kiai diserahkan kepada mesin partai pendukung kandidat.

Faktor ekonomi dalam pertimbangan kiai itu didasarkan juga pada liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan yang masif sehingga biaya operasional pendidikan semakin tinggi dan berdampak langsung pada kondisi finansial pesantren. Situasi tersebut yang mendorong kiai dan pengelola pesantren untuk memikirkan cara-cara lain yang mudah dan efektif untuk memperoleh bantuan yang bisa digunakan untuk pembangunan pesantren. Inilah yang menjadi salah satu faktor keterlibatan kiai dalam politik karena keterlibatan itu akan membuka jaringan donasi yang baru. Dengan kekuatannya sebagai basis

massa, Pesantren dapat melakukan *bargaining* politik dengan para politisi yang memerlukan dukungan politik pesantren, baik sekedar moril hingga mobilisasi suara dalam pilkada. Namun demikian pesantren sering membantah melakukan *bargaining* politik dengan kompensasi ekonomi. (Rijal: 2013)

Begitu halnya dengan kondisi di Pesantren Al-Munawwir, KH Muhtarom menegaskan bahwa tidak ada *bargaining* politik yang dilakukan antara pihak pesantren dengan kedua pasang calon yang bersaing dalam Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015, termasuk dengan Abdul Halim muslih yang memiliki kedekatan khusus dengan pesantren. Meski demikian sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak dipungkiri bahwa Pesantren Al-Munawwir juga menerima donasi untuk pembangunan pesantren terutama dari elit-elit partai PKB. Melalui jaringan kepartaian tersebut terbuka pula jaringan donasi hingga ke negara timur-tengah.

G. Faktor Kelembagaan dalam Perilaku Politik Kiai Pondok Pesantren Al-Munawwir

Secara teoritis kesamaan identitas kelembagaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku politik seseorang. Kelembagaan ini dapat menimbulkan adanya ikatan emosional dan kekeluargaan antara satu individu dengan individu lainnya. Seseorang biasanya akan mengedepankan kepentingan yang berkaitan dengan lembaga tempatnya bernaung daripada dengan kepentingan lainnya yang sifatnya umum atau publik. Hal ini dilandaskan atas ikatan yang muncul dari kesamaan identitas tersebut.

Dalam dunia politik, faktor lembaga tentu sangat berpengaruh mengingat kontestan politik juga berasal dari lembaga-lembaga politik yang lebih dikenal dengan partai politik. Selain itu terdapat kelembagaan lainnya yang turut berperan dalam proses politik terutama dalam pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), organisasi-organisasi sayap dari partai politik hingga organisasi masyarakat dan keagamaan. Kesemua lembaga itu akan berperan dalam sebuah kontestasi politik dengan menjalankan perannya masing-masing.

Lembaga pendidikan juga tidak kehilangan peran dalam urusan politik, termasuk di dalamnya adalah Pondok Pesantren yang memiliki basis massa. Basis massa yang dimiliki pesantren menjadi daya tarik bagi para politisi untuk mengembangkan jaringannya dan mendapatkan dukungan dalam sebuah kontestasi politik. Melalui sebuah proses pendekatan, pada akhirnya akan

timbul sebuah relasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya termasuk antara pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan partai politik sebagai lembaga atau organisasi politik. Relasi itu timbul biasanya didasarkan oleh adanya kesamaan pandangan, selain itu juga karena adanya kesamaan atau keterkaitan suatu kepentingan.

Pesantren Al-Munawwir merupakan pesantren NU yang besar dan cukup berpengaruh di Yogyakarta. Dua tokoh yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pesat pesantren ini adalah pendirinya KH. Munawwir dan menantunya yaitu KH. Ali Maksum. Dua tokoh ini mempunyai pesona yang kuat sehingga apa yang difatwakan bisa menjadi rujukan santrinya dan masyarakat, termasuk dalam urusan politik. Semasa ditinggal oleh KH. Ali Maksum, pesantren ini mengalami guncangan internal sehingga kepengurusannya terbagi menjadi dua yaitu Yayasan Ali Maksum dan Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwir. Titik ini menjadi awal dinamika politik di Pesantren Al-Munawwir.

Secara historis pesantren ini adalah Pesantren NU yang melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa. Adalah peran dari KH. Ahmad Warson Munawwir yang memprakarsai berdirinya partai PKB di Yogyakarta, sehingga secara garis sejarah pesantren ini dikenal memiliki relasi dengan partai tersebut. Relasi tersebut sempat terganggu dengan adanya perpecahan di kubu internal PKB sehingga beberapa tokoh Al-Munawwir ikut menyokong berdirinya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang diinisiasi oleh kecewanya kiai-kiai NU kepada sikap Gus Dur.

Berdasarkan perpecahan kepengurusan yang terjadi di pesantren Al-Munawwir dan PKB, maka sikap politik di pesantren pun terpecah belah. Satu kelompok merapat ke PKNU sebagai alternatif dari PKB yang dianggap tidak dapat menyampaikan visi ulama dan pesantren. Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwir mendukung kepada PKNU dengan mencalonkan Nyai Ida Fatimah Zainal (istri KH. Zainal Abidin Munawwir yang memimpin pesantren putri) sebagai calon anggota legislatif DPRD Yogyakarta.

Kelompok kedua yaitu yayasan KH. Ali Maksum yang mendukung partai demokrat, hal ini dapat dipahami karena Anas Urbaningrum sebagai mantan Ketua Umum Partai Demokrat adalah menantu dari KH. Attabik Ali (anak KH. Ali Maksum) yang menikahi Athiyyah Laila Attabik tahun 1999. Faktor kekeluargaan ini cukup berpengaruh meski pesona dari Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak bisa dikesampingkan. Hal ini bisa dibuktikan melalui hasil pemilihan legislatif 2009 di Desa Panggungharjo yakni sebagai berikut:

Tabel 3.3
Hasil Pemilu Legislatif 2009 Desa Panggungharjo

No	Partai	Suara Sah 19.181	
		Jumlah Suara Partai	Persentase (%)
1	PDIP	5220	27
2	Demokrat	4147	21
3	Golkar	2263	11,7
4	PKB	1644	8,5
5	PKNU	1295	6,75

Sumber: KPUD Bantul 2017

Dari hasil pemilu di atas terlihat bahwa suara Partai Demokrat unggul jauh dibandingkan dengan partai PKB dan PKNU. Dalam pemilu itu pun Nyai Ida Zainal gagal menduduki kursi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Besarnya suara demokrat sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya sosok Anas Urbaningrum yang menjadi anggota keluarga Yayasan Ali Maksum. PKNU yang sejatinya sebagai alternatif bagi Al-Munawwir atas kekecewaannya terhadap PKB ternyata juga tidak bisa menyainginya meski perbedaan suara tidak signifikan.

Begitu pula dalam pemilihan presiden tahun 2009 yang diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu Megawati-Prabowo, SBY-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto terlihat jelas kemenangan besar dari pasangan SBY-Boediono yang didukung oleh 25 partai politik termasuk PKB dan Demokrat, dua partai besar yang menjadi relasi dari pesantren Al-Munawwir. Kemenangan itu bisa dibuktikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 di Desa Panggungharjo

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Megawati Soekarno Putri – Prabowo Subianto	4366
2.	Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono	9549
3.	Jusuf Kalla – Wiranto	2271
Jumlah		16186
Jumlah Suara Tidak Sah		1002

Sumber: KPUD Kabupaten Bantul 2017

Partai Demokrat dan PKB yang sama-sama menjadi pendukung pasangan calon berhasil memperlihatkan bahwa peranan pesantren dalam bidang politik cukup berpengaruh. Secara signifikan tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di sekitar pesantren Al-Munawwir memiliki sikap politik yang sama dengan pesantren. Berikut rincian hasil rekapitulasi suara di TPS sekitar Pesantren Al-Munawwir:

Tabel 3.5
Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres 2009 di TPS sekitar Pesantren Al-Munawwir

No TPS	Suara Sah yang Diperoleh		
	Megawati – Prabowo	SBY – Boediono	JK – Wiranto
44	53	168	25
45	22	154	83
46	28	164	64
47	33	176	67
48	89	173	68
49	29	177	98
50	32	154	66
51	39	212	78
52	81	225	65
53	20	167	88
54	62	134	28
55	33	114	63
56	62	179	56

Sumber: KPUD Kabupaten Bantul 2017

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa pasangan SBY – Boediono yang didukung oleh partai PKB dan Demokrat di TPS sekitar pesantren Al-Munawwir mendapatkan suara tinggi dengan perbedaan signifikan dibandingkan pasangan calon lainnya. Hal ini bisa diakibatkan atas kehadiran relasi Anas Urbaningrum dengan keluarga besar Pesantren Krapyak (Ali Maksum dan Al-Munawwir). Meski demikian, pesona SBY memang tidak bisa dikesampingkan dengan perolehan suara yang cukup signifikan. Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa dalam pilpres 2009 pilihan politik masyarakat Krapyak atau Panggungharjo, sinergi dengan pilihan politik pesantren.

Dalam pemilihan legislatif tahun 2014 baik itu di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional suara Partai Demokrat turun drastis dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini mungkin dikarenakan terlibatnya partai tersebut dalam beberapa kasus korupsi sehingga mengurangi simpati dan dukungan dari rakyat. Termasuk di dalamnya terdapat nama Anas Urbaningrum yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Februari 2012. Dengan peristiwa itu, relasi kepartaian di Pesantren Al-Munawwir mengalami pemetaan yang tidak terprediksi karena suara yang diperoleh selalu berubah-ubah. Berikut hasil pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Bantul, DPRD DIY dan DPR RI tahun 2014 di Desa Panggungharjo di mana Pesantren Al-Munawwir itu berada:

Tabel 3.6**Tabel Perolehan Suara Parpol pada Pemilu Legislatif 2014 di Desa Panggungharjo**

No	Nama Partai	Perolehan Suara Sah			Jumlah	Urutan
		DPRD Bantul	DPRD DIY	DPR RI		
1	Nasdem	647	508	822	1977	8
2	PKB	2254	1554	1280	5088	4
3	PKS	1318	951	904	3173	7
4	PDIP	2822	3855	4283	10960	1
5	Golkar	1066	2354	1327	4747	5
6	Gerindra	3971	2796	2003	8770	2
7	Demokrat	518	487	839	1844	9
8	PAN	1728	1653	2547	5928	3
9	PPP	1515	1438	1380	4333	6
10	Hanura	249	212	261	722	10
11	PBB	84	83	102	269	11
12	PKPI	72	52	49	173	12

Sumber: KPUD Kabupaten Bantul 2017

Tabel di atas menggambarkan bahwa PKB masih menjadi salah satu pilihan warga Krpyak dan Pesantren Al-Munawwir. Lain halnya dengan suara Partai Demokrat pada pemilu 2014 yang lalu nyaris terpinggirkan, bahkan tidak masuk di urutan 5 besar sama sekali. Kesimpulan lainnya bahwa pilihan pesantren tidak selalu sinergi dengan pilihan politik masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi tentunya salah satunya adalah kinerja dari kader yang ada pada partai politik itu sendiri yang menjadi sorotan orang banyak.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, PKB dan Demokrat berada di satu kubu dengan mendukung pasangan nomor urut satu yaitu Suharsono dan Abdul Halim Muslih. Dalam setiap tingkatan daerah, pasangan Suharsono – Halim mengunci suara dengan hasil yang cukup signifikan.

Tabel 3.7
Perolehan Suara Pilkada Bantul 2015 di Panggunharjo, Sewon dan Kabupaten Bantul

No	Lokasi	Perolehan Suara Kandidat		Selisih Suara
		Suharsono – Halim	Sri Surya – Munir	
1	Desa Panggunharjo	7081	3643	3438
2	Kecamatan Sewon	26100	23699	2401
3	Kabupaten Bantul	260834	233196	27638

Sumber: KPUD Kabupaten Bantul 2017

Di Desa Panggunharjo pasangan Suharsono – Halim mendapatkan suara sebanyak 7081 suara sedangkan pesaingnya Sri Surya Widati – Misbakhul Munir mendapatkan 3643 suara. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan pesantren Al-Munawwir dengan partai PKB masih cukup erat, meski pesantren tersebut tidak secara terang-terangan menyatakan dukungannya.

Di tingkat kecamatan, Al-Munawwir terletak di Kecamatan Sewon yang mana di situ suara pasangan nomor urut satu yang didukung oleh PKB mendapatkan kemenangan dengan selisih perolehan suara yang tidak terlalu jauh. Di Kecamatan Sewon pasangan Suharsono – Abdul Halim Muslih mendapatkan 26100 suara (52,41%) sedangkan Sri Surya Widati – Misbakhul Munir mendapatkan 23699 suara (47,59%). Secara keseluruhan pasangan nomor urut satu Suharsono – Abdul Halim Muslih berhasil memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015 dengan total perolehan suara sebesar 260834 suara (52,80%) mengalahkan pasangan nomor urut dua Sri Surya Widati – Misbakhul Munir yang memperoleh suara sebesar 233196 (47,20%).

Terkait dengan identitas kelembagaan KH. Muhtarom menjelaskan:

“untuk saya pribadi, tidak ada kepentingan apa-apa. Mungkin yang lain ada. Saya hanya kenal Pak Halim saja, kalau dengan Pak Suharsono tidak begitu kenal. Kalau Pak Halim kan sama-sama santri, jadi karena latarbelakang santri saja. Kalau urusan relasi politik, Al-Munawwir kan dekatnya dengan PKB. Ya sedikit banyak ada kedekatan, Al-Munawwir memang arahnya ke PKB. PDIP kan tidak, ya memang ada juga yang Golkar, tapi sekarang kecenderungannya PKB. Kedekatan dengan PKB memang sudah sejak didirikannya PKB, KH Warson dan KH Najib juga kan dekat dengan PKB, kalau saya tidak begitu dekat. Cuma memang kenal dengan beberapa anggota PKB seperti Pak Agus Sulis di DPR pusat dari PKB. Beliau kan alumni Al-Munawwir. Di Krapyak hampir semua diterima, perbedaan-perbedaan politik itu harmonis-harmonis saja”. (Wawancara KH Muhtarom, 26 Februari 2017).

Kesimpulan dari pendapat beliau adalah kiai-kiai di Al-Munawwir saat ini tidak diinstruksikan untuk condong atau mendukung salah satu partai politik atau tokoh politik tertentu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan politik, kini dikembalikan ke masing-masing individu. Biasanya kecondongan politik Al-Munawwir adalah kepada individu atau kelompok yang juga mempunyai jiwa santri sehingga punya keinginan untuk selalu dekat dengan Islam pada umumnya dan Pesantren Al-Munawwir pada khususnya. Melalui hal itu maka akan timbul ikatan emosional sehingga mempengaruhi perilaku politik kiai di Pesantren Al-Munawwir.

Berdasarkan dari pembahasan di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa dari berbagai faktor identitas bersama yang mempengaruhi perilaku politik kiai Pesantren Al-Munawwir dalam Pilkada Bantul tahun 2015, terdapat dua faktor dominan yaitu identitas sakral agama dan identitas kelembagaan. Dua identitas tersebut adalah faktor yang paling

dipertimbangkan dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015 yang lalu. Identitas sakral agama menjadi pertimbangan mengingat adanya doktrin-doktrin tertentu dalam ajaran Islam mengenai tata cara memilih pemimpin. Doktrin tersebut melekat dan menjadi sebuah keharusan untuk dipatuhi sehingga menjadi sebuah acuan dalam memilih seorang pemimpin politik.

Sebagai pembanding, studi lain mengenai perilaku politik kiai juga tidak terlepas dari identitas agama. Sebagai contoh, karakteristik kiai di Rembang dalam memainkan peran penting dalam politik lokal adalah dengan kekuatan atau simbol-simbol agama. Kekuatan agama mendominasi basis karakteristik kiai karena kiai sebagai *public figure* masyarakat yang mempunyai *ilmu linuiah* (ilmu agama) sehingga masyarakat mempercayakan pilihan politiknya kepada kiai. Singkat kata bahwa simbol-simbol keagamaan akan menjadi basis kekuasaan seorang kiai (Wafa, 2012: 66). Studi lainnya menjelaskan perilaku politik di kalangan pesantren secara langsung atau tidak langsung terjadi karena kesamaan asas dan tujuan walaupun latar belakang historis antara pesantren dengan relasi politiknya jauh berbeda, namun kesamaan asas tersebutlah yang menjadi faktor penghubung kerjasama harmonis antara keduanya yaitu antara pesantren dengan elit politik. Sehingga tidak heran faktor agama bagi lingkungan kiai di pesantren akan menjadi tolak ukur bersikap dalam politik (Ramdani, 2009: 107).

Identitas kelembagaan sebagai salah satu faktor dominan dimaksudkan sebagai relasi lembaga (pesantren) dengan partai politik secara khusus. Relasi

ini cukup berpengaruh dengan didukung oleh studi lain bahwa berbagai Pondok Pesantren adalah daya tarik bagi elit politik untuk membentuk sebuah relasi yang dapat menghasilkan simbiosis mutualisme. Contoh relasi yang terjalin antara partai politik dengan pesantren adalah antara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Pondok Pesantren Daruttafsir Kabupaten Bogor. Relasi tersebut terjalin karena hubungan pendiri pesantren dengan tokoh-tokoh NU dimana NU sendiri adalah sebagai partai politik yang kemudian memfusikan diri ke PPP. Peran pesantren dalam relasi ini adalah untuk menjembatani kebutuhan basis massanya serta menjadi ajang dakwah untuk terus mengkader santri sebagai calon pemimpin yang berakhlak baik (Ramdani, 2009: 108).

Relasi PPP dengan pesantren juga terjadi dengan Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang. Hasil dari relasi itu adalah terpilihnya pasangan H.M Salim dan H. Abdul Hafidz sebagai pasangan bupati dan wakil bupati pada Pemilu 2009. Dapil di pesantren Al-Anwar (dapil 4) turut juga menyumbangkan kemenangan untuk PPP dengan perolehan suara sebesar 26.143 suara pada pemilu 2014. (Fahmi dkk: 12)

Dari studi perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor agama dan kelembagaan paling mempengaruhi perilaku politik kiai. Hal ini dibuktikan dengan adanya relasi pesantren dengan partai politik yang berasaskan Islam. Asas Islam tersebut menjadi pengikat antara keduanya dengan harapan untuk mencapai tujuan yang sama yakni kemaslahatan umat pada umumnya dan tercipta iklim politik Islami pada khususnya.